



# LAPORAN KINERJA

## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

**TAHUN**  
**2019**

Jalan Pemuda Km 5,5 No.1 Kuala Kapuas Kode Pos 73515  
Telp. ( 0513 ) 21686, 21005 Fax ( 0513 ) 21010, 21732

# KATA PENGANTAR

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syaloom, Om Swasti Astu, Tabe Selamat Lingu Nalatai – Salam Sahujud Karendem Malempang, Salam Sejahtera.*

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas dilaporkan berdasarkan amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman kepada Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disamping itu juga menjadi alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Kapuas Tahun 2019.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi kinerja dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mewujudkan visi Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.

Perlu disampaikan pula bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini sebelum dilakukan pelaporan telah melalui proses Review oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas dan hasilnya disampaikan melalui Laporan Hasil Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2019 Nomor 780/08/LHR/INSP.KPS/2020 tanggal 7 April 2020. Beberapa point atas rekomendasi telah dilakukan perbaikan dan tindak lanjut dalam narasi dan data yang dilaporkan, namun beberapa rekomendasi lainnya yang dikaitkan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama serta perubahan dokumen perencanaan daerah akan dilakukan secara bertahap dalam tahun 2020 ini.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan komitmen seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas serta masyarakat yang selalu memberikan dukungan dalam pembangunan daerah Kabupaten Kapuas untuk menuju ke arah yang lebih baik. Demikian dan terima kasih.

*Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Syaloom, Om Santhi Santhi Santhi Om, Sahi Sahi Sahi.*

Kuala Kapuas, 29 April 2020

**BUPATI KAPUAS,**



**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

# PENYATAAN TELAH DIREVIU



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS INSPEKTORAT

Jl. Patih Rumbih No.80 Telp (0513) 22268 Fax. 21355 Kuala Kapuas

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Kuala Kapuas, 07 April 2020

INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS



HERIOWO. SH., CFA

Pembina

NIP. 19640607 1998608 1 005

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019, maka terdapat 5 Tujuan dan 24 Sasaran. Dari 5 Tujuan dengan 9 Indikator tujuan diperoleh 2 indikator tujuan mencapai target dan 7 indikator tujuan dengan capaian diatas 90%. Sedangkan pada 24 Sasaran dengan 42 indikator sasaran diperoleh 25 indikator sasaran mencapai target serta terdapat 2 Indikator sasaran dengan capaian dibawah 50%. Namun secara umum capaian kinerja Tahun 2019 sangat baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pencapaian kinerja pada periode pemerintahan Tahun 2018-2023 yang akan datang diperlukan adanya koordinasi yang aktif. Koordinasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan sinergi dari seluruh perangkat daerah. Setiap perangkat daerah memiliki peran dan fungsi tersendiri namun tetap berkolaborasi dan berkerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas (APBD) menganggarkan belanja sebesar Rp. 1.768.803.555.342,-. Anggaran belanja daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini lebih kecil dibandingkan Tahun 2018 yakni sebesar Rp. 1.982.631.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.921.085.590.189,01. Sedangkan untuk realisasi keuangan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.611.689.276.752 atau 91,12%.

# DAFTAR ISI

---

	<b>Hal</b>
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Susunan Organisasi Perangkat Daerah .....	1
C. Kapasitas Aparatur Sipil Negara .....	3
D. Aspek Strategis .....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	
A. Rencana Strategis .....	10
B. Indikator Kinerja Utama .....	13
C. Perjanjian Kinerja .....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran .....	
BAB IV PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	91
B. Permasalahan dan Saran Perbaikan .....	91
LAMPIRAN .....	
1. Perjanjian Kinerja Kabupaten Kapuas Tahun 2019 .....	
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kabupaten Kapuas Tahun 2019 .....	
3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 .....	
4. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019 .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja menjadi garda terdepan pemerintah daerah menuju *good governance*. Hal ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja juga menjadi salah satu sasaran reformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja dalam kerangka reformasi birokrasi dilaksanakan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP. SAKIP secara umum bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pembangunan daerah maka disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019. Laporan kinerja ini memberikan gambaran hasil pencapaian target kinerja dalam melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran telah ditetapkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 merupakan laporan tahun ke 2 (dua) dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Tahun 2018 - 2023. Laporan ini memuat realisasi capaian kinerja disertai dengan realisasi keuangan selama tahun 2019.

### B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah membentuk susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah yang telah dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas merupakan Sekretariat Daerah :
  - I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang membawahkan 3 Bagian :
  - II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang membawahkan 3 bagian :
  - III. Asisten Administrasi Umum yang membawahkan 3 bagian :
  - IV. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
  - V. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
  - VI. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
3. Sekretariat Korpri
4. Inspektorat Daerah

5. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
  - d. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran
  - e. Dinas Sosial
  - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - g. Dinas Ketahanan Pangan
  - h. Dinas Pertanian
  - i. Dinas Tenaga Kerja
  - j. Dinas Transmigrasi
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - l. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
  - m. Dinas Lingkungan Hidup
  - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - o. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
  - p. Dinas Perhubungan
  - q. Dinas Perikanan
  - r. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  - s. Dinas Komunikasi dan Informatika
  - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Badan Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - d. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan diatas, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. Wilayah kerja pemerintahan di Kabupaten Kapuas terbagi dalam 17 (tujuh belas) kecamatan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kapuas

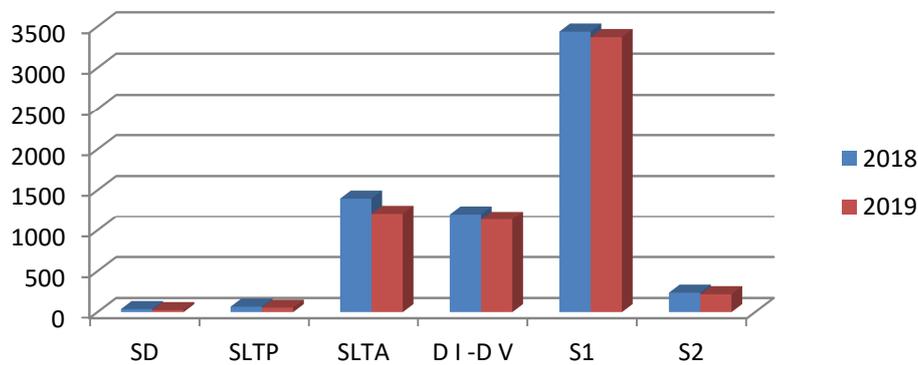
No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Ibu Kota Kecamatan
1	Kapuas Kuala	-	13	Lupak Dalam
2	Tamban Catur	-	10	Tamban Catur
3	Kapuas Timur	-	7	Anjir Serapat
4	Selat	8	2	Kuala Kapuas
5	Bataguh	1	14	Bataguh
6	Basarang	-	14	Basarang
7	Kapuas Hilir	5	3	Barimba
8	Pulau Petak	-	12	Sei Tatas
9	Kapuas Murung	2	21	Palingkau
10	Dadahup	-	13	Dadahup
11	Kapuas Barat	1	11	Mandomai
12	Mantangai	-	38	Mantangai Tengah
13	Timpah	-	9	Timpah
14	Kapuas Tengah	-	13	Pujon
15	Pasak Talawang	-	10	Jangkang
16	Kapuas Hulu	-	14	Sei Hanyo
17	Mandau Talawang	-	10	Sei Pinang

### C. KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6.014 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang berjumlah sebanyak 6.109. ASN tersebut tersebar di seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas maka PNS didominasi oleh lulusan S1 dan S2 sebesar 59,69 persen atau sebanyak 3.590, diikuti lulusan SMA sebesar 20,11 persen dan lulusan Diploma sebesar 18,88 persen. Namun demikian masih ada lulusan SMP ke bawah sekitar 1,29 persen. Berikut jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan.

**Grafik 1.1**  
Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2018-2019



#### D. ASPEK STRATEGIS

Dalam memenuhi amanah rakyat dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah ditetapkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019. Dalam merealisasikan target-target kinerja dalam dokumen perencanaan tersebut Pemerintah Daerah didukung oleh aspek-aspek strategis sebagai berikut.

##### a. Aspek Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Kapuas terletak pada 0° 8' 48" - 3° 27' 00" LS dan 113° 2' 36" - 114° 44' 00" BT, secara umum terbagi dalam 2 (dua) bagian, yakni daerah sebelah utara (meliputi 6 Kecamatan) merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit sedangkan daerah selatan (meliputi 11 Kecamatan) merupakan daerah pesisir, dataran rendah dan rawa-rawa. Dengan Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 14.999 Km<sup>2</sup> atau 9,77% dari luas Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 1.2**  
Luas Kabupaten Kapuas Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase wilayah (%)
1	Kapuas Kuala	360,62	2,40
2	Tamban Catur	66,38	0,44
3	Kapuas Timur	202,00	1,35
4	Selat	111,74	0,74
5	Bataguh	282,26	1,88
6	Basarang	206,00	1,37
7	Kapuas Hilir	91,00	0,61
8	Pulau Petak	135,00	0,90
9	Kapuas Murung	288,45	1,92
10	Dadahup	202,55	1,35



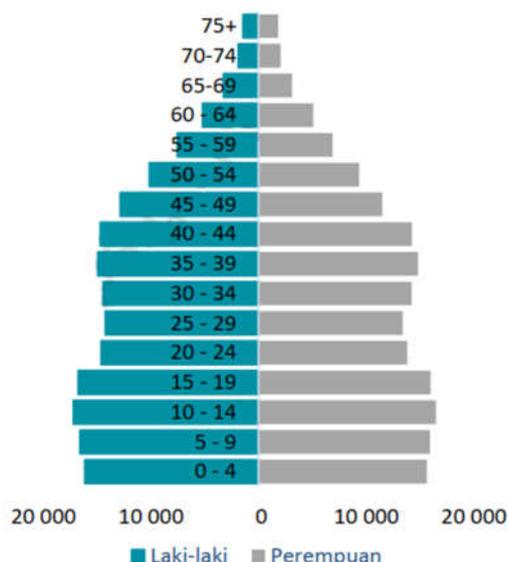
Secara yuridis formal, Kabupaten Kapuas dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1959 Nomor 72 tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 1820). Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan tuntutan untuk pemekaran wilayah, maka sejak tahun 2002 Kabupaten Kapuas dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni Kabupaten Kapuas (Kabupaten Induk), Kabupaten Pulang Pisau (Kabupaten hasil pemekaran) dan Kabupaten Gunung Mas (Kabupaten hasil pemekaran) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002.

Selain kondisi geografis wilayah, karakteristik wilayah Kabupaten Kapuas meliputi Wilayah selatan (12 kecamatan) memiliki karakteristik pasang surut (rawa) yang berpotensi untuk lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sementara wilayah utara (5 kecamatan) dengan karakteristik berbukit-bukit sangat sesuai untuk lahan perkebunan, kehutanan, peternakan dan pertambangan.

## b. Aspek Demografi Daerah

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tahun 2018 sebanyak 356,4 ribu jiwa. Jumlah penduduk ini meningkat dibandingkan tahun 2017 dengan jumlah penduduk sebesar 353,8 ribu jiwa. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh *sex ratio* yang nilainya lebih besar dari 100. Pada tahun 2018, untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki.

**Grafik 1.2**  
Piramida Penduduk, 2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Selama periode 2016-2018, tingkat pertumbuhan penduduk tercatat melambat dari 0,86 persen pada tahun 2016 menjadi 0,80 persen tahun 2017. Begitu juga pada pertengahan tahun 2018 mengalami perlambatan menjadi 0,72 persen. Dengan luas wilayah sekitar 14.999 km<sup>2</sup>, maka setiap km<sup>2</sup> ditempati penduduk sebanyak 24 orang pada pertengahan tahun 2018.

**Grafik 1.3**

Indikator Kependudukan Kapuas, 2016-2018

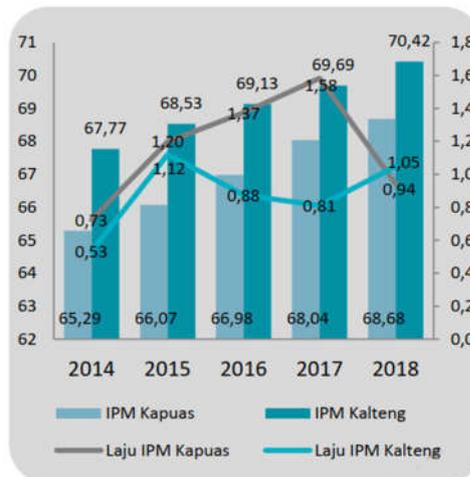
Uraian	Satuan	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk	ribu jiwa	351,0	353,8	356,4
Pertumbuhan Penduduk	persen	0,86	0,80	0,72
Kepadatan Penduduk	jiwa/km <sup>2</sup>	23	24	24
Sex Ratio (L/P)	persen	104	104	104
Jumlah Rumah Tangga	ribu rumah tangga	89,83	90,55	91,20
Rata-rata ART	jiwa/rumah tangga	4	4	4

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia (umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan memiliki standar hidup layak) di Kabupaten Kapuas. Selama periode 2014-2018, IPM Kabupaten Kapuas selalu mengalami peningkatan. Meskipun rata-rata IPM Kapuas dalam lima tahun masih dibawah angka Kalimantan Tengah, namun sejak tahun 2014 pertumbuhan IPM di Kapuas selalu diatas pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah hingga tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan IPM Kalimantan Tengah.

**Grafik 1.4**

Indeks Pembangunan Manusia Kapuas, 2014-2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

### c. Aspek Ekonomi Daerah

Aspek ekonomi daerah Kabupaten Kapuas dapat diamati dari berbagai indikator seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan per kapita dan indikator ekonomi lainnya. PDRB Kabupaten Kapuas sebagai salah satu komponen indikator kinerja pembangunan ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahunnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kapuas menunjukkan kecenderungan positif dan di atas pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Laju pertumbuhan PDRB Kapuas Tahun 2018 sebesar 7,01 persen, sedangkan tahun 2016 tumbuh sebesar 7,62 persen. Pada tahun 2018, PDRB Perkapita Kapuas mencapai 42,55 persen, dengan pertumbuhan perkapita sebesar 6,25 persen.



Sumber :Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

Dilihat dari distribusi PDRB Kapuas, struktur ekonomi Kapuas ditopang oleh kategori pertanian sebesar 26,43 persen, disusul oleh kategori perdagangan 16,27 persen, kategori pertambangan sebesar 13,38 persen, dan kategori industri pengolahan sebesar 11,53 persen.

**Grafik 1.6**  
Distribusi persentase PDRB menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2018



Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018–2023 telah ditetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dijadikan sebagai arah pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta seluruh jajarannya berkewajiban melaksanakan program-program pembangunan serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023, sehingga berakhir dengan perwujudan Visi di akhir periode RPJMD, yakni :

*“Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”*



Pernyataan visi tersebut terbagi dalam 5 elemen sebagai berikut :

### ✓ **Maju**

Elemen visi ini ingin mewujudkan kondisi masyarakat Kapuas yang tumbuh dan berkembang, baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Kondisi maju merupakan hasil keterpaduan antar sektor yang menjadi unggulan Kabupaten Kapuas dengan memanfaatkan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Ditinjau dari aspek ekonomi, maju diukur dari tingkat kemakmuran dengan meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat dan perekonomian yang lebih merata. Lembaga dan pranata ekonomi dikelola dan diberdayakan kembali agar berfungsi dengan baik, sehingga dapat mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang tercermin dari semakin tinggi tingkat pendidikan. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat Kapuas yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

✓ **Sejahtera**

Elemen visi ini merupakan perwujudan kondisi masyarakat Kapuas yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu. Masyarakat Kapuas diharapkan memiliki rasa kehidupan yang aman, damai dan tenteram lahir batin serta dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Pemerintah dapat menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban seluruh masyarakat Kapuas. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kondisi sejahtera yang sesuai sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Kapuas.

✓ **Mandiri**

Mandiri merupakan kondisi yang ingin diwujudkan agar seluruh masyarakat merasa merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat secara proporsional, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, serta mampu mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya. Dengan perwujudan mandiri diharapkan masyarakat memiliki semangat yang kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan pembangunan. Dalam tataran birokrasi, mandiri diwujudkan sebagai aparatur yang memiliki kemampuan yang cukup dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur sipil negara serta dapat menjadi panutan masyarakat. Peran serta tokoh agama dan tokoh adat maupun pengusaha menjadi penting sebagai perantara untuk mewujudkan keseimbangan dalam kemandirian masyarakat.

✓ **Adil dan merata**

Hasil pembangunan yang diselenggarakan sebagai usaha bersama dari seluruh para pemangku kepentingan harus dapat dirasakan adil dan merata di semua lapisan masyarakat hingga ke kampung-kampung. Tidak ada lagi kesenjangan sosial, diskriminasi SARA, dan terpupuk kesetaraan gender dalam pembangunan Kapuas lima tahun kedepan. Dalam hal ini, setiap masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan roda pembangunan.

✓ **Pembangunan Berkelanjutan**

Pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan di Kabupaten Kapuas adalah hasil pembangunan dapat mencukupi kebutuhan sekarang dan generasi mendatang tanpa harus mengurangi kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan yang akan datang. Dengan adanya perwujudan visi pembangunan berkelanjutan diharapkan masyarakat Kabupaten Kapuas mampu mencukupi kebutuhan sekarang tanpa dibarengi dengan tindakan yang merusak kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi alam, sumber energi manusia dan IPTEK yang berperspektif dan berprinsip pembangunan berkelanjutan.

## **A. RENCANA STRATEGIS**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menyusun rencana strategis berupa misi, tujuan hingga sasaran. Adapun rumusan misi tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

## MISI

1. Mempercepat pembangunan peningkatan jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan permukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi, membuka pelatihan pertanian, agro bisnis dan agro industri dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang dengan memberikan Kartu Petani dan Nelayan Sejahtera, pupuk, kapur, Saprodi, Alsintan dan Alat Tangkap Gratis.
3. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi, memfasilitasi kehadiran investor pada bidang hilirisasi sesuai potensi sumber daya alam dan masyarakat bekerja di perusahaan yang sudah operasional (sawit dan batubara).
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah, bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat Dayak.
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang, menerima guru kontrak untuk memberikan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu pada tingkat SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa Kepada Lulusan SLTA/MA di Kabupaten Kapuas yang memperoleh ranking 1 s/d 3 untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi serta mewujudkan berdirinya Universitas Kapuas.
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan, balai latihan kerja dan memberikan pelatihan perbengkelan modern untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil dan merata, menerima tenaga kontrak bidang kesehatan serta pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan Menyediakan Kartu Kapuas Sehat untuk BPJS GRATIS.
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan (Bagi Yang Putus Sekolah Diberikan Pelatihan Perbengkelan, dan Jasa Lainnya), kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
12. Meningkatkan peran, fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, Guru Agama, Guru Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa, Babinkamtibmas dan meningkatkan Insentif Guru Mengaji, Kaum Masjid, Guru Sekolah Minggu, Damang, Mantir, Kepala Handel, Basir, Pemangku Agama Hindu, Pedanda, Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri, RT, Kepala Desa, BPD Desa dan Petugas Pemadam Kebakaran

serta mengalokasikan anggaran pembangunan yang dikelola Kelurahan setara dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan ASN, tenaga kesehatan, guru-guru kontrak, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, dan meningkatkan Tunjangan Daerah bagi Pejabat dan ASN, serta meningkatkan Insentif guru - guru kontrak, tenaga kesehatan kontrak.

## TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023 ditetapkan 5 tujuan dan 24 sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat
- b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c) Menurunnya prevalensi *Stunting*
- d) Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan
- e) Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan
- f) Meningkatnya daya beli masyarakat
- g) Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS
- h) Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Tujuan 2 : Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah
- b) Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
- c) Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas
- d) Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
- e) Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
- f) Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat, dengan sasaran :

- a) Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- b) Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota
- c) Meningkatnya kualitas penataan ruang
- d) Meningkatnya pelestarian warisan budaya
- e) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tujuan 4 : Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur, dengan sasaran :

- a) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
- b) Meningkatnya kualitas permukiman

Tujuan 5 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat, dengan sasaran:

- a) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- c) Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama atau disingkat dengan IKU merupakan penetapan atas indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 545/ORG Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 – 2023 yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Berikut Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas.

**Tabel 2.1**

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ <p>Dimana:  X(1) : Indeks harapan hidup  X(2) : Indeks pendidikan = <math>2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3 (\text{indeks rata-rata lama sekolah})</math>  X(3) : Indeks standar hidup layak</p> $\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{\min}}{X(i)_{\max} - X(i)_{\min}}$ <p>Dimana:  X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)  X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)  X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM :</p>

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi															
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(I))</th> <th>Nilai Mak.</th> <th>Nilai Min.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata lama sekolah</td> <td>15</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996</td> <td>732.720 a)</td> <td>300.000 b)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>	Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai Mak.	Nilai Min.	Angka Harapan Hidup	85	25	Angka Melek Huruf	100	0	Rata-rata lama sekolah	15	0	Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)
Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai Mak.	Nilai Min.																
Angka Harapan Hidup	85	25																
Angka Melek Huruf	100	0																
Rata-rata lama sekolah	15	0																
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)																
		Angka Kemiskinan	<p><b>Definisi Operasional :</b> Persentase penduduk dengan kategori pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.</p> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>															
		Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>															
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p><b>Definisi Operasional :</b> Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.</p> $\frac{PDRB_{(tahun+1)} - PDRB_{(tahun)}}{PDRB_{(tahun)}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>															
		Indeks Gini	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ <p>dimana:  <i>P<sub>i</sub></i> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-<i>i</i>  <i>Q<sub>i</sub></i> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<i>i</i></p>															

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
			<p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah</li> <li>♦ <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang</li> <li>♦ <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</li> </ul> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Angka Kriminalitas	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Data awal jumlah tindak kriminal} - \text{Data Akhir jumlah tindak kriminal}}{\text{Data awal jumlah tindak kriminal}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil laporan dari Polresta Kab.Kapuas</p>
4	Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur	Angka Konektivitas	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kecamatan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</p>
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Forumulasi :</b> Nilai Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Pemerintah Kab. Kapuas</p> <p><b>Sumber data :</b> LHE Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB</p>
		Nilai SAKIP	<p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran</p> <p><b>Sumber data :</b> LHE SAKIP dari Kementerian PANRB</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	<p><b>Definisi Operasional :</b> Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani</p> <p><b>Sumber data :</b> Dinas Pendidikan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
		Harapan Lama Sekolah	<b>Definisi Operasional :</b> Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang <b>Sumber data :</b> Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<b>Definisi Operasional :</b> Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
3	Menurunnya prevalensi <i>Stunting</i>	Persentase Angka <i>Stunting</i> (%)	<b>Definisi Operasional :</b> Jumlah balita sangat pendek dan pendek pada suatu periode dibagi jumlah seluruh balita pada periode yang sama x 100% <b>Sumber data :</b> Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	<b>Definisi Operasional :</b> Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG berkisar 0-100 persen, semakin tinggi nilai IPG maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	<b>Definisi Operasional :</b> Persentase pemuda berprestasi = $\frac{\text{Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh}}{\text{Jumlah peserta yang dikirim}} \times 100\%$ Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi = Persentase pemuda berprestasi tahun berjalan – Persentase pemuda berprestasi tahun sebelumnya. <b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita / Tahun	<b>Definisi Operasional :</b> Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
			rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Jumlah PMKS yang mampu hidup mandiri}}{\text{Jumlah seluruh PMKS yang dibina}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Sosial Kab. Kapuas
8	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 Tahun)}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
9	Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai PDRB sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dibagi PDRB total kabupaten $\frac{\text{Jumlah nilai PDRB tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan}}{\text{Jumlah nilai investasi awal}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Nilai industri pengolahan}}{\text{Nilai total PDRB}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> Sensus ekonomi dan berbagai survei BPS
		Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Produksi perikanan tahunn harga pada tahun dasar (2010)}}{\text{PDRB total Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Nilai perdagangan}}{\text{Nilai total PDRB}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> Sensus ekonomi dan berbagai survei BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
10	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	<p><b>Definisi Operasional :</b> Data ketersediaan pangan berdasarkan sistem informasi (aplikasi) PPH Ketersediaan Pangan.</p> <p><b>Sumber data :</b> Data Susenas (BPS)</p>
		Skor PPH Konsumsi	<p><b>Definisi Operasional :</b> Data Konsumsi pangan berdasarkan sistem informasi (aplikasi) PPH Konsumsi Pangan.</p> <p><b>Sumber data :</b> Data Susenas (BPS)</p>
11	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Nilai investasi awal} - \text{Nilai akhir}}{\text{Nilai investasi awal}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan nilai investasi bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</p>
12	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</p>
13	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan penilaian kesehatan koperasi berkualitas oleh Bidang Koperasi dan UKM</p>
		Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah UMKM Akhir} - \text{Jumlah UMKM Awal}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan hasil pendataan pertumbuhan usaha UKM langsung dilapangan oleh Bidang Koperasi dan UKM</p>
14	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	<p><b>Definisi Operasional :</b> 1/3 (IKE + IKL+IKS) Indeks ketahan Ekonomi Indeks Ketahanan Lingkungan Indeks Ketahanan Sosial</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Hasil Indeks Desa Membangun (IDM)</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
15	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKA - INA = \sum_{i=1}^n w_{ii}$ <p>Keterangan :  w : bobot  I : sub-indeks  Perhitungan IKA-INA sesuai template SISKANA</p> <p><b>Sumber data :</b>  Hasil pemantauan kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup</p>
		Indeks kualitas udara	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil pemantauan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup dan Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), KLHK-RI</p>
		Tutupan Lahan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$ <p>Keterangan :  IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan  ITH = Indeks Tutupan Hutan  IPH = Indeks Performance Hutan  IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah  IKBA = Indeks Konservasi Badan Air  IKH = Indeks Kondisi Habitat</p> <p><b>Sumber data :</b> Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK - RI</p>
16	Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota	Skor penilaian adipura	<p><b>Definisi operasional:</b>  Nilai Titik Pantau Program Penghargaan Adipura</p> <p><b>Sumber data :</b>  Hasil penilaian adipura oleh tim penilai adipura</p>
17	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Luas kawasan peruntukan permukiman}}{\text{Luasan kawasan yang sesuai rencana tata ruang}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Tata Ruang DPUPRKP Kab. Kapuas</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia}}{\text{Luasan RTH yang seharusnya}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Pertamanan &amp; Kebersihan DPUPRPKP Kab. Kapuas</p>
18	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Jumlah warisan budaya ditetapkan Provinsi Kalimantan Tengah	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah warisan budaya yang ditetapkan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) Tahun</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</p>
		Jumlah Kunjungan Wisata	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kunjungan pada destinasi wisata Kabupaten Kapuas dalam satu tahun</p> <p><b>Sumber data :</b> Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</p>
19	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka konflik	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Data awal jumlah konflik} - \text{Data Akhir jumlah konflik}}{\text{Data awal jumlah konflik}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil laporan dari Polresta Kab. Kapuas dan Bagian Tapem Setda</p>
		Penurunan pelanggaran Perda	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah Kasus pelanggaran perda yang selesai ditindaklanjuti</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Penegakan Perda</p>
20	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Panjang jalan dalam kondisi mantap	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik} + \text{kondisi sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kab. Kapuas</p>
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi}}{\text{Total jumlah desa}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
		Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi darat keibu kota}}{\text{Total jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Perhubungan</p>
21	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga Kab. Kapuas}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database cipta karya - BPS</p>
		Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air limbah}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga Kab. Kapuas}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database Cipta Karya – BPS</p>
		Persentase rumah layak huni	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Total jumlah rumah} - (\text{RTLH} - \text{Penanganan})}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Perumahan</p>
		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh perkotaan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database Cipta Karya – BPS</p>
		Rasio Elektrifikasi	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga teraliri listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Data PLN, Data Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Kalteng dan Pemantauan Lapangan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	<b>Definisi Operasional :</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas <b>Sumber data :</b> LHP BPK RI atas Laporan keuangan
		Nilai SAKIP	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran <b>Sumber data :</b> LHE SAKIP dari Kementerian PANRB
23	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik <b>Sumber data :</b> LHE atas penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian PANRB
24	Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor EPPD	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah <b>Sumber data :</b> Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri

### C. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 pada Bulan Agustus terjadi perubahan. Perubahan tersebut didasari atas adanya penyesuaian tujuan dan sasaran serta target pada saat penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Untuk itu, Perjanjian Kinerja Perubahan ini yang selanjutnya dilakukan pengukuran atas realisasi kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja pada laporan ini. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019.

**Tabel 2.2**  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,19
1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,80
		Harapan Lama Sekolah	12,94
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,47
2	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan	Angka Kemiskinan	5,02
2.1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Jumlah PMKS(diluar Korban Bencana)	19.916
2.2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96,59
		Indeks Pemberdayaan Gender	71,5
2.3	Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	10,32
2.4	Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi/nasional	6
		Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi	5
		Jumlah kunjungan wisatawan	600
2.5	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama	Jumlah Konflik	0
3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.61
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,67
3.1	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	0,595
3.2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	6.65
3.3	Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,87
3.4	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86
3.5	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	6.35
		Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan (termasuk reparasi kendaraan bermotor)	9.36
3.6	Meningkatnya penanaman modal usaha di Kabupaten Kapuas	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	7.574,11

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
4	Melestarikan Lingkungan Hidup dan kearifan lokal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.65
4.1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	50
		Indeks kualitas udara	90
4.2	Terwujudnya kelestarian budaya dayak	Jumlah konflik tenurial terkait dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah	0
5	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Gini	0.2983
5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	62.06
5.2	Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman lancar, dan terjangkau	Jumlah penumpang angkutan umum	18.000
5.3	Optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Persentase rumah layak huni	35.00
		Rasio Elektrifikasi	75.00
		Persentase rumah tangga sumber air minum layak	45.00
		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Limbah Layak (%)	57
		Presentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai Tata Ruang	100%
		Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	84,17
6	Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh aspek pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	45
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	3.15
6.2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti)*	75
6.3	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai evaluasi SAKIP	63.00 B
		Skor penyelenggaraan pemerintahan daerah	2,8875
6.4	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,31

**Tabel 2.3**

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,19
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,8
			Harapan Lama Sekolah	12,94
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,47
		Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	38
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96,59
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	2,30
			Angka Kemiskinan	4,96
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita / Tahun	10.143.965
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	5,46
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,61
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,40
2.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,82
		Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20,69
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	12,00
			Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,87
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,03
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	80,2
			Skor PPH Konsumsi	85,5
Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	5,72		

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	6,15
			Indeks Gini	0,2983
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	3,06
			Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	58
		Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	0,601
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,12
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	48,80
			Indeks Kualitas Udara	89,26
			Tutupan Lahan	63,22
		Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota	Skor penilaian adipura	75,70
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	8,32
			Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	33,06
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya	jumlah warisan budaya ditetapkan propinsi kalimantan tengah	NA
			Jumlah Kunjungan Wisata	7000
			Angka Kriminalitas	3,70
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka konflik	16
			Penurunan pelanggaran Perda	126
4	Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur		Angka Konektivitas	66,84
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Panjang jalan dalam kondisi mantap	60,14 (1.289,45 Km)
			Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	40
			Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	83

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	45,89
			Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	55,66
			Persentase rumah layak huni	87,12
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	76,34
			Rasio Elektrifikasi	75
5.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	45
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	WTP
			Nilai SAKIP	67,00 (B)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	3,15
		Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor EPPD	2,8075

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas atas program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Untuk mencapai visi dan misi tiap tahun Pemerintah Kabupaten Kapuas menetapkan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai arah pembangunan daerah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja tujuan dan sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rumusan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan dilakukan analisis capaian kinerjanya pada bagian dibawah ini sebanyak 5 tujuan dan 24 sasaran dengan 51 indikator kinerja. Berikut realisasi dan analisis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019.

Tujuan  
1

Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia

Tujuan pertama Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah berfokus pada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Peningkatan SDM diperlukan sebagai tolok ukur utama daya saing daerah. SDM yang berkualitas otomatis akan memiliki daya saing tinggi dan mampu meningkatkan kapasitas dirinya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM dilaksanakan melalui penguatan pembangunan bidang Pendidikan dan kesehatan.

**Tabel 3.1**

Capaian kinerja meningkatkan kualitas dan kapasitas kehidupan sumber daya manusia

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Manusia	70,19	69,38	<b>98,84 %</b>
2	Angka Kemiskinan	4,96	5,20*	<b>95,12%</b>
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,61	4,08	<b>88,50 %</b>

\* Data BPS Kab. Kapuas Tahun 2018

Untuk mengukur capaian kinerja meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia digunakan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja ke-3 indikator tersebut sebagai berikut.

#### ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Secara data statistik indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Kapuas mengalami peningkatan dari angka 68,68 di tahun 2018 naik menjadi 69,38 pada tahun 2019. Namun, indeks pembangunan manusia Kabupaten Kapuas tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berhubung Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat optimis dalam penetapan target IPM tahun 2019.

Langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya dapat dilakukan dengan setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan IPM, akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target yaitu sebagai berikut.

1. Program pendidikan anak usia dini
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
3. Program pendidikan non formal
4. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
5. Program manajemen pelayanan pendidikan
6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
7. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
8. Program upaya kesehatan masyarakat
9. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
10. Program pelayanan kesehatan Penduduk miskin
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
12. Program peningkatan pelayanan BLUD
13. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan jaringannya
14. Program obat dan perbekalan kesehatan
15. Program pengawasan Obat dan Makanan
16. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
17. Program pengembangan lingkungan sehat

18. Program perbaikan gizi masyarakat
19. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
20. Program standarisasi pelayanan kesehatan
21. Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
22. Program pengembangan industri kecil dan menengah
23. Program peningkatan kemampuan teknologi industri
24. Program peningkatan dan pengembangan ekspor
25. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
26. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
27. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
28. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
29. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
30. Program pembinaan pedagang kaki lima dan Asongan
31. Program pengembangan sentra sentra industri potensial
32. Program pengadministrasi dan fasilitasi pembangunan ekonomi daerah
33. Program penanganan konflik sumber daya alam bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan

Realisasi Capaian indikator kinerja indeks pembangunan manusia dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan, serta meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat diukur berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.2**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rata-rata Lama Sekolah	7,8	7,51	<b>96,28 %</b>
2	Harapan Lama Sekolah	12,94	12,70	<b>98,15 %</b>

Capaian Tahun 2018 untuk rata-rata lama sekolah mencapai 7,51 atau sebesar 96,28% terdapat deviasi sebesar -0,29 atau -3,72% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019, dan untuk Harapan Lama Sekolah mencapai 12,70 atau sebesar 98,15% terdapat deviasi sebesar -0,24 atau -1,85% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Untuk capaian RLS dan HLS Kabupaten Kapuas tahun 2019 masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ada beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan yang perlu segera diselesaikan, yaitu peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan dasar, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan

dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

Melihat permasalahan-permasalahan yang di beberapa program atau kebijakan yang dijalankan Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas antara lain Kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi ruang kelas belajar, penambahan ruangan kelas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan.

Dalam upaya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan maka Dinas Pendidikan melaksanakan beberapa program kegiatan antara lain sebagai berikut.

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui kegiatan-kegiatan cara lain pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini, perencanaan dan penyusunan program pendidikan anak usia dini, bantuan Operasional PAUD, pendidikan keluarga, penambahan ruang kelas PAUD (1 Unit), rehab ruang kelas PAUD (2 Sekolah) dan pengadaan alat praktik dan peraga untuk PAUD.
2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan kegiatan-kegiatan antara lain, pembangunan gedung sekolah (5 sekolah), pembangunan atau rehab rumah dinas (6 sekolah), peningkatan halaman sekolah (8 sekolah), pembangunan perpustakaan sekolah (1 sekolah), pembangunan sarana air bersih dan sanitasi sekolah (1 sekolah), pengadaan buku dan alat tulis siswa (buku rapor tingkat SD dan SMP), pengadaan seragam sekolah ( $\pm 2.800$  stel), pengadaan meubelair sekolah (30 sekolah), pemeliharaan ruang UKS, pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa (OSN, O2SN, FLS2N dan GSI), dan ujian dan *try out* tingkat SD/SMP.
3. Pendidikan non-formal melalui kegiatan pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal. Untuk melengkapi pendidikan formal yang ada maka diperlukan pendidikan yang kegiatan belajar mengajar diadakan diluar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan dan bimbingan belajar.
4. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidikan kepada guru untuk memenuhi kompetensi dan kualifikasi selaku Pendidik, Pembinaan dan Pelatihan Guru (PPPG) sebagai syarat dalam memperoleh sertifikasi, pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik terkait pendanaan untuk pembayaran intensif kepada guru kontrak.
5. Manajemen pelayanan pendidikan melalui kegiatan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan, pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan, pembinaan dewan pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

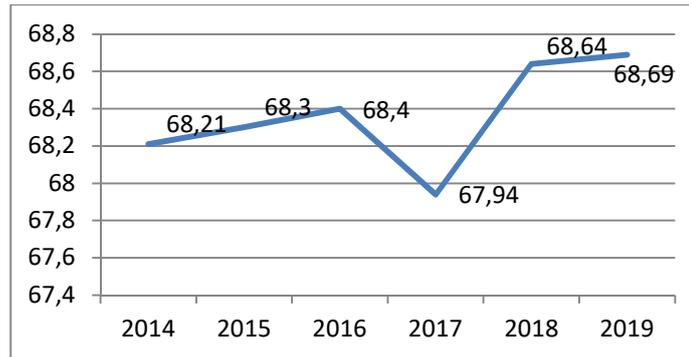
**Tabel 3.3**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Harapan Hidup	69,47	68,69	<b>98,87 %</b>

**Grafik 3.1**

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kapuas dari Tahun 2014-2019



Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan masyarakat, data BPS menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Kapuas tahun 2019 sebesar 68,69%, dari data series yang kami tampilkan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir pencapaian Indikator Kinerja Utama Angka Harapan Hidup sudah banyak mengalami peningkatan dari 68,21% di tahun 2014 menjadi 68,69% di tahun 2019 memang pencapaian ini masih dibawah target tahun 2019 yaitu sebesar 69,47%, banyak faktor yang dapat mempengaruhi Angka Harapan Hidup, adapun faktor paling mendasar adalah ; kondisi kesehatan seseorang, riwayat medis keluarga, faktor lingkungan, keadaan ekonomi, sosial, psikis, jenis kelamin, dan ras juga yang tak kalah penting adalah sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, tenaga kesehatan yang memadai dan mudah terjangkau, peraturan pemerintah (seperti pembatasan kawasan merokok, pajak rokok yang tinggi, dan sejak kecil masyarakat diajarkan tata cara hidup sehat).

Adapun manfaat dari data Angka Harapan Hidup ini nantinya dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan strategis dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Beberapa hambatan/kendala dalam pencapaian target dan sasaran diantaranya adalah masih terbatasnya tenaga kesehatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di daerah terpencil, terbatasnya peralatan kesehatan, logistik dan sarana penunjang pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di desa-desa serta sulitnya akses untuk pelayanan karena kondisi geografis yang sulit dijangkau.

### 3. Sasaran Strategis Menurunnya Prevalensi Stunting

Pencapaian target kinerja atas sasaran menurunnya prevalensi Stunting diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.4**

Evaluasi pencapaian sasaranmenurunnya prevalensi Stunting

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Angka Stunting	38	27,6	<b>72,63%</b>

Penanganan penurunan angka stunting dilakukan dengan dua cara yaitu secara spesifik dan sensitif dengan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong upaya penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kapuas untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Sektor Kesehatan dalam hal ini meliputi upaya spesifik terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan pelibatan lintas program peningkatan kesehatan keluarga dan gizi serta upaya perbaikan sanitasi dan perubahan perilaku dengan promosi kesehatan, pencegahan penyakit menular dan pemerataan pelayanan kesehatan selain itu upaya pelibatan lintas sektor terkait juga berkontribusi secara signifikan terhadap Penurunan angka stunting Kabupaten pada Tahun 2019.

Gambaran angka penurunan stunting tahun 2019 terlihat pada tabel 3.4 diatas sebesar 27,6%, selama ini angka stunting masih mengacu kepada peran serta masyarakat yaitu tingkat keaktifan posyandu sehingga angka stunting masih mengandalkan hasil riset dan survei dengan fluktuasi gambaran angka stunting yang berbeda. Untuk gambaran pemetaan angka stunting diambil dari aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E - PPGBM) yang di rekomendasikan oleh Kemenkes RI sebagai alat pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita.

Pemantauan status gizi melalui aplikasi E- PPGBM untuk Kabupaten Kapuas baru 41,5% data balita yang di ukur dan di input sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi angka stunting yang sebenarnya. Rendahnya capaian dikarenakan tidak semua wilayah memiliki listrik dan sinyal dalam pengiputan data serta luas wilayah yang luas yang memerlukan waktu tenaga dan biaya yang tidak sedikit, serta alat pengukuran yang memenuhi standar masih belum dimiliki oleh semua desa dan puskesmas, melalui E - PPGBM diharapkan semua balita di desa terdata dan dapat dipantau status gizinya setiap bulan.

Pendekatan Penurunan prevalensi stunting sektor Kesehatan dilakukan melalui data E-PPGBM yang berdasarkan rekap hasil pendataan dan pemantauan pertumbuhan yang dilakukan di posyandu, sehingga naik turunnya penurunan prevalensi stunting erat kaitannya dengan perilaku dan tingkat pengetahuan keluarga dalam pola pengasuhan serta faktor sosial ekonomi dan budaya dimasyarakat, berdasarkan kajian upaya penurunan stunting hanya 30 % bisa diatasi oleh bidang kesehatan sedangkan 70 % di lakukan oleh lintas sektor terkait.

Intervensi secara Spesifik melalui Dinas Kesehatan meliputi beberapa program unggulan dalam rangka usaha penurunan angka stunting antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kelas IBU

Pelaksanaan kelas ibu adalah Kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan layanan kesehatan pada ibu hamil yang dilakukan dengan pertemuan sebanyak 4 kali selama kehamilan, sehingga ibu hamil mendapatkan pengetahuan dan konseling terkait masalah kesehatan selama hamil dan persiapan untuk melahirkan.



Gambar 1. Pelaksanaan Kelas Ibu oleh Puskesmas

Target capaiannya adalah 50 % puskesmas di kabupaten melaksanakan kelas ibu, jumlah Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu untuk kabupaten Kapuas tahun 2019 sebesar 96,15 % dengan keikut sertaan ibu hamil di kelas ibu sebesar 41,6% rendahnya keikut sertaan ibu hamil di kelas ibu masih terkendala akses dan kondisi geografis dimana masih banyak masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil .

## 2. *On the Job Training* Pemberian Makanan Bayi Dan Anak (OJT PMBA)

*On the Job Training* Pemberian Makanan bayi dan anak merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kader dalam melakukan pola pengasuhan dengan pemberian makanan menggunakan bahan pangan lokal sebagai sumber penenuhan gizi keluarga. Untuk tahun 2019 secara bertahap semua bidan dan petugas gizi mengikuti pelatihan PMBA, selanjutnya dimasing masing Puskesmas dapat melaksanakan pelatihan di tingkat puskesmas dan desa menggunakan dana Puskesmas.

Untuk tahun 2019 semua tenaga kesehatan puskesmas sudah 100 % terlatih PMBA di harapkan di tahun 2020 secara bertahap seluruh bidan desa dan Kader posyandu di desa juga mengikuti pelatihan PMBA dengan pendanaan sharing melalui dana puskesmas dan dana desa



Gambar 2. Proses Pelatihan PMBA

## 3. Persalinan di fasilitas Kesehatan .

Setiap ibu hamil diupayakan melahirkan di fasilitas kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu dan anak, Dinas Kesehatan melalui program Jampersal dan JKN membantu pembiayaan proses persalinan sehingga setiap persalinan mendapatkan layanan dan pertolongan yang maksimal agar tidak terjadi kematian ibu

dan kematian bayi akibat terlambat rujukan dan penanganan, untuk 2019 puskesmas mampu layanan pertolongan persalinan di faskes 65,38%, di tahun 2020 diharapkan secara bertahap ada peningkatan mutu layanan baik dari ketersediaan sarana dan prasarana dan kualitas SDM dan dukungan lintas sektor terutama desa dalam melakukan rujukan ibu bersalin ke fasilitas kesehatan.

#### 4 Pengembangan Kelas Ibu Balita

Kelas ibu balita yang dilaksanakan pada saat kegiatan posyandu adalah upaya meningkatkan pengetahuan ibu terkait masalah tumbuh kembang dan kesehatan balita dan bagaimana upaya mengatasinya. Kegiatan ini dilaksanakan 1 kali pertemuan berdasarkan kategori usia anak, hasil capaian pelaksanaan kelas ibu balita tahun 2019 yang dilaksanakan oleh 65,38 %, kegiatan ini merupakan upaya untuk perubahan perilaku sehingga meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat .



Gambar 3. Pelaksanaan kelas ibu balita

#### 5. Kegiatan Ketuk Pintu Kurangi Stunting ( Ketupat Kuning)

Program inovasi dalam upaya penanganan terintegrasi dalam mengatasi masalah stunting pada balita yang ditemukan sehingga bisa pelibatan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan berdasarkan masalah yang ditemukan dari hasil kajian dan penanganan lebih intensif tepat sasaran. Puskesmas di harapkan lebih peka dan bisa langsung mengatasi permasalahan bersama lintas sektor. Program ketupat kuning merupakan program inovasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten Kapuas yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2019 sehingga di tahun 2020 diharapkan setiap puskesmas bisa mengintegrasikan penanganan dan pencegahan stunting dengan lintas program dan lintas sektor.

Selain intervensi spesifik ada juga intervensi sensitif dengan pelibatan peran lintas sektor terkait, di tahun 2019 Kabupaten Kapuas ditetapkan sebagai daerah lokus stunting dengan penetapan tersebut ada upaya –upaya yang dilakukan melalui pembentukan Tim Konvergensi penanganan dan pencegahan stunting Kabupaten Kapuas dengan pelibatan SOPD terkait yaitu Bappeda, BPMDes, pada tahun 2019 ada beberapa kegiatan KP2S dalam upaya meningkatkan peran lintas sector.

Pada tahun 2019 ada 5 ( lima) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Kapuas dalam kegiatan intervensi spesifik dan sensitif sebagai dasar hukum penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kapuas :

- 1) SK Tim Intervensi Stunting Dinas Kesehatan nomor: 3169/Kesmas.1/10.2019;

- 2) Surat Edaran Bupati tentang Implementasi Komunikasi perubahan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan stunting Nomor: 1595/Diskes/VI/Tahun 2019;
- 3) Peraturan Bupati tentang penurunan stunting Nomor 39 Tahun 2019 ;
- 4) Keputusan Bupati Kapuas nomor 221/Bappeda/ 2019 tentang pembentukan Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan penurunan stunting Kabupaten Kapuas;

Adapun 5(lima) aksi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 dalam rangka konvergensi percepatan penanganan dan pencegahan stunting yaitu:

1. Aksi I (pertama) Analisa Situasi telah dilaksanakan rapat pada tanggal 10 Juli 2019 di aula Bappeda dengan pimpinan rapat Kepala Bappeda Kabupaten Kapuas Sebagai leading sector, hasil rapat telah ditetapkan 34 desa lokus intervensi stunting untuk Tahun 2020 yang ditetapkan dengan SK Bupati Kapuas No. 433/BAPPEDA TAHUN 2019 Tgl. 7 Oktober 2019).
2. Aksi II Penyusunan Rencana Kegiatan Tahun 2020 telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019. Pada kegiatan tersebut mengundang seluruh SOPD terkait dan melakukan inventarisasi program dari masing-masing SOPD terkait upaya integrasi dalam percepatan dan penanganan serta pencegahan stunting
3. AKSI 3 (Rembuk Stunting) telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Menghasilkan komitmen bersama untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kapuas



Gambar 4. Pelaksanaan rembuk stunting

4. AKSI 4 Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Peran/Kewenangan Desa telah sampai pada tahap Verifikasi pusat
5. AKSI 5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 18-19 Nopember 2019. Pelatihan KPM telah dilaksanakan oleh Dinas PMD melalui Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Manusia (PSDM) di desa.

#### 4. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.5**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender	96,59	96.26	<b>99,00 %</b>

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPK, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Apabila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Untuk menghitung Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kapuas dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan formulasi dan variable indicator penyusunan diperoleh dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk.

Dalam upaya untuk mendukung mencapai target kinerja sasaran terkait meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kapuas, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

A. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

1. Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak ( P2TP2A ). Kegiatan Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kapuas Timur, Kapuas Hilir, Bataguh, Selat, Basarang, Pulau Petak, dan Kapuas Murung. Dalam penyuluhan ini melibatkan kepolisian, kejaksaan serta rumah sakit, agar masyarakat tahu dan mengerti bila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam menanganinya.
2. Kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak. Kegiatan dari program ini adalah dilaksanakannya kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Kapuas . Penilaian Gerakan sayang Ibu (GSI) Tingkat Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dilaksanakan di Desa Sei Asam Kecamatan Kapuas Hilir. Tujuan dari program Kegiatan Gerakan Sayang Ibu (GSI) antara lain : untuk menurunkan angka kematian Ibu karena hamil, melahirkan, nifas, menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan pengetahuan Ibu tentang penyakit dan memantapkan pengetahuan, wawasan Ibu mengenai pentingnya arti kesehatan.
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Terlaksananya kegiatan sosialisasi Kota Layak Anak ( KLA ) di Kecamatan Selat. Pelaksanaan kabupaten / kota layak anak Kabupaten Kapuas Tahun 2019 dilaksanakan di Kecamatan Selat sebagai contoh pelaksanaan KLA. Dalam pelaksanaan KLA masing-masing Kelurahan/ Desa menentukan I RT Layak Anak sebagai percontohan pelaksanaan kegiatan KLA, kemudian kalau sudah mantap pelaksanaan kegiatan KLA

akan bergeser ke RT yang lain. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, diharapkan mampu menekan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, serta hasil yang sangat diharapkan adalah untuk memupuk kesadaran masyarakat terkait dengan hal dimaksud.

#### B. Program Keluarga Berencana

1. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu. Kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu dilakukan dengan mengadakan orientasi bagi pendidik sebaya kelompok PIK R yang ada di sekolah menengah atas, juga menentukan kelompok PIK R yang berhak mengikuti kegiatan temu kader kelompok PIK R yang diselenggarakan dari tingkat Kabupaten, Provinsi sampai dengan tingkat pusat. Pelaksanaan kegiatan PIK R berupa sosialisasi pada kelompok PIK R yang ada di sekolah menengah, sehingga diperoleh kesadaran akan arti pentingnya pendewasaan usia perkawinan.
2. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana. Kegiatan Pembinaan Keluarga Berencana ditujukan untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber KB. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu antar semua komponen yang ada di kabupaten dan Kecamatan yang melibatkan semua unsur seperti bidan dan tenaga medis yang lain. Pelaksanaan Pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) Kabupaten dan Kecamatan dilakukan secara berkesinambungan untuk memperoleh peserta KB baik itu peserta KB baru maupun pembinaan peserta KB aktif.
3. Kegiatan Pelayanan KIE. Kegiatan merupakan sarana mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan program KB yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah. Melalui sarana kendaraan Mobil Unit Penerangan (MUPEN) KB penerangan ini dilakukan di hampir seluruh Kecamatan terutama Kecamatan yang kesertaan ber KB nya masih sangat rendah.
4. Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Penyuluh KB. Kegiatan merupakan upaya untuk memenuhi tersedianya kebutuhan operasional balai Penyuluhan KB di Kecamatan dalam upaya meningkatkan kinerja balai penyuluhan KB. Kegiatan ini disediakan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Non Fisik.

#### C. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1. Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan  
Perlindungan hak perempuan diberikan melalui perhatian nyata, konsistensi dan sistematis yang ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Peran para pemangku kepentingan baik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan program perlindungan hak perempuan.  
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
  - a. Perlindungan hak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan melakukan pendampingan kasus/korban KDRT dan sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - b. Perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO (sedang dalam proses)
  - c. Perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan.
  - d. Perlindungan hak perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus (SDKK)
- d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  1. Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam peran pembangunan. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender, permendagri Nomor 15 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamatkan pembentukan kelembagaan PUG, yaitu Kelompok Kerja PUG dan vocal point.

Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah membentuk sebagaimana amanat permendagri tersebut. Pokja PUG telah terbentuk, namun belum di laksanakan sosialisasi dan advokasi kepada anggota Pokja, sehingga anggota Pokja PUG belum sepenuhnya paham akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota pokja.

Dengan terlaksananya sosialisasi dan advokasi PUG diharapkan segera dapat dibentuk vocal point gender pada masing-masing perangkat daerah agar pengimplementasian PUG pada program dan kegiatan dapat terlaksana.

e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat.

1. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok di Masyarakat  
Kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan berbagai macam lomba bagi kelompok-kelompok kegiatan, seperti kader-kader kelompok bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ada di kecamatan.

Indikator kegiatannya adalah diselenggarakannya penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok di masyarakat. Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan kelompok-kelompok kegiatan yang ada baik itu dari segi fisik maupun dari segi kualitas kegiatan. Tahun 2018 telah dilaksanakan lomba Kader kelompok Bina Keluarga Balita tingkat Kabupaten Kapuas yang selanjutnya diikuti dilomba tingkat provinsi.

Adapun item kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan lomba Kader Bina Keluarga Lansia (BKL) tingkat Kabupaten Kapuas, pemenang satu akan mewakili Kabupaten Kapuas ke tingkat Provinsi. Di harapkan dari kegiatan lomba ini, memacu semangat baik kader, pengelola BKB dan ibu Balita, Keluarga Harmonis dan Lansia untuk lebih mengembangkan potensi diri dan kelompok dalam keikutsertaan dalam proses membangun manusia yang berkualitas.

Diharapkan kader-kader kelompok bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) dapat meningkatkan pengetahuannya dalam membina kelompok yang ada dilingkungannya

f. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

1. Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Progran KB Nasional  
Indikator Programnya adalah tersedianya data dan informasi program KB mengenai data demografi, keluarga berencana dan tahapan keluarga. Indikator ini digunakan untuk melihat serta mengevaluasi pelaksanaan program KB Nasional melalui kegiatan pelaporan dan pengendalian lapangan. Adapun item kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Melaksanakan pendataan pelayanan kontrasepsi ( pelkon ) tingkat Desa di 17 Kecamatan

- b. Membuat laporan pengendalian lapangan (dallap).
- c. Pembinaan, pencatatan, pelaporan R/R Kabupaten ke Kecamatan dan sosialisasi R/R ke klinik

## 5. Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.6**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	2,30	22,70	>100%

Realisasi indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi adalah 22,70 Realisasi initeh lebih melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 2,30. Pencapaian target kenaikan yang signifikan bahwa penetapan target untuk 5 (lima) tahun prestasi/juara yang dihitung adalah berdasarkan medali/ penghargaan bukan berdasarkan peserta/ orang yang berprestasi dalam mengikuti Event dimaksud.

**Tabel 3.7**

Perkembangan capaian persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi dari Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	2018	2019
1	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	1,84	22,70

Capaian kinerja sasaran meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan diperoleh dari berbagai event yang diikuti. Dari 10 event yang berpartisipasi pada tahun 2019, hanya 3 event yang memperoleh prestasi. Berikut daftar prestasi berdasarkan event yang diikuti.

### a. Paskibraka

4 (empat) orang lulus seleksi Paskibraka Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah :

1. Dwi Andika Saputra (SMAN 1 Kuala Kapuas)
2. Rizky Ari Pratama (MAN Selat Tengah Kuala Kapuas)
3. Faradhiba Tantri Lemba (SMAN 2 Kuala Kapuas)
4. Henny Yuliani (SMAN 1 Kapuas Hilir)

### b. Festival Isen Mulang

1. 1 (satu) tim juara 1 lomba malamang (5 orang)
2. 1 (satu) tim juara 1 lomba ukir kayu (1 orang)
3. 1 (satu) tim juara 2 lomba lawing sekepeng putri (2 orang)
4. 1 (satu) tim juara 3 lomba lawing sekepeng putra (2 orang)
5. 1 (satu) tim juara 3 mangenta (5 orang)

6. 1 (satu) tim juara 3 besei kambe (2 orang)

**c. Festival Pelajar**

1. 1 (satu) tim juara 2 lomba menganyam tikar purun (2 orang)
2. 1 (satu) tim juara harapan 1 tari pedalaman dan tari pesisir (15 orang)
3. 1 (satu) tim juara harapan 1 lomba lukis lenga (1 orang)
4. 1 (satu) tim juara harapan 2 lomba vocal group (5 orang)
5. 1 (satu) tim juara harapan 2 lomba lukis ornament (1 orang)



Gambar 5. Seleksi Paskibraka Tingkat Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019

**ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR ANGKA KEMISKINAN**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas angka kemiskinan Kabupaten Kapuas sebesar 5,20. Data tersebut masih merupakan data pada tahun 2018. Oleh karena itu masih belum dapat menjadi tolak ukur capaian kinerja tahun 2019. Namun dapat menjadi gambaran kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Kapuas.

Angka kemiskinan tersebut terus mengalami tren positif dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Angka kemiskinan pada tahun 2016 sebesar 5,70 dan pada tahun 2017 menjadi 5,32. Dengan data kinerja dari tahun 2016-2018 maka angka kemiskinan kabupaten kapuas terus berkurang. Berikut perkembangan indikator kinerja angka kemiskinan Kabupaten Kapuas dari tahun 2016-2018.

**Tabel 3.8**

Indikator kinerja angka kemiskinan Kabupaten Kapuas dari tahun 2016-2018

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018
1	Angka Kemiskinan	5,70	5,32	5,20

Realisasi Capaian indikator kinerja angka kemiskinan dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni meningkatnya daya beli masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja angka kemiskinan.

## 1. Sasaran Strategis Meningkatnya daya beli masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya daya beli masyarakat diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.9**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya daya beli masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun (Rp./Tahun)	10.143.965	14.691.684	>100 %

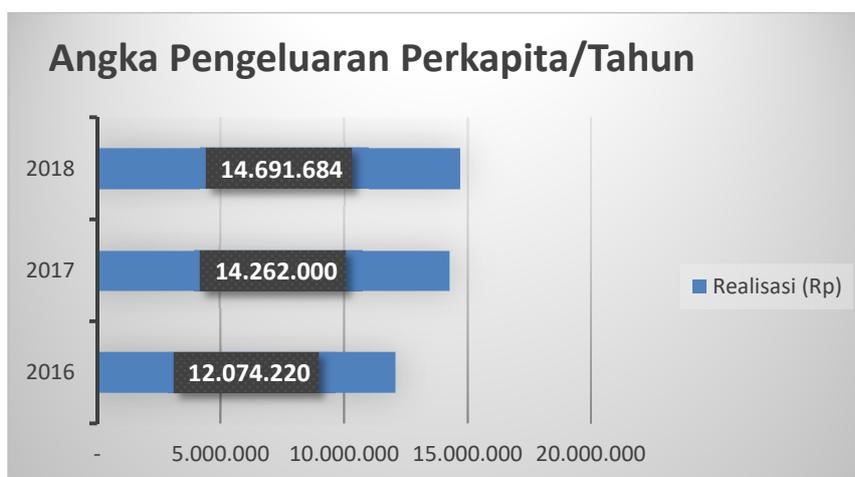


Gambar 6. Kegiatan pasar murah di Kuala Kapuas

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 10.143.965/Tahun terealisasi sebesar Rp. 14.691.684/Tahun.

**Grafik 3.2**

Perkembangan capaian indikator Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun dari Tahun 2016-2018



Dari diagram di atas terjadi kenaikan Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 429.684 hal ini disebabkan oleh meningkatnya daya beli masyarakat yang ditunjang oleh pembangunan infrastruktur, kenaikan pendapatan

ASN & bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada sektor ini sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Untuk perlu lebih meningkatkan pencapaian kinerja Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun maka perangkat daerah akan meningkatkan pembangunan sarana prasarana serta berkolaborasi dengan perangkat daerah teknis yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.10**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	5,46	51,15	>100 %

Secara definitif, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 26 kategori, yakni :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan kedisabilitas
6. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
7. Lanjut usia terlantar
8. Penyandang Disabilitas
9. Tuna Susial
10. Gelandangan
11. Pengemis
12. Pemulung
13. Kelompok Minoritas
14. Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan
15. Orang dengan HIV/AIDS
16. Korban Napza
17. Korban Traficking
18. Korban Tindak Kekerasan
19. Pekerja Migran Bermasalah
20. Korban Bencana Alam
21. Korban Bencana Sosial
22. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
23. Fakir Miskin
24. Keluarga bermasalah sosial psikologis
25. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
26. Komunitas Adat Terpencil

Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2019, dari 26 PMKS tersebut di Kabupaten Kapuas terdapat ada 10 jenis PMKS dengan jumlah seperti terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
Tabel Jumlah PMKS terdapat di Kabupaten Kapuas Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Terlantar	192
2.	Anak Berhadapan dengan Hukum	14
3.	Anak dengan kedisabilitas	145
4.	Lanjut Usia Terlantar	3263
5.	Penyandang Disabilitas	1424
6.	Korban Bencana Alam	291
7.	Korban Bencana Sosial	136
8.	Pengemis	7
9.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	277
10.	Fakir Miskin	142.148
11.	Komunitas Adat Terpencil	972
<b>Total</b>		<b>148.869</b>

Berdasarkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam rangka peningkatan jumlah PMKS yang menerima bantuan program kesejahteraan Sosial terdapat beberapa program strategis yang disinergikan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, yakni :

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah kepesertaan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 7.892 Kepala Keluarga
2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ) dengan jumlah kepesertaan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 10.764 Kepala Keluarga
3. Program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dengan jumlah kepesertaan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.250 Kepala Keluarga
4. Program bantuan Kelompok Usaha Bersama dengan jumlah kepesertaan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 2.580 Kepala Keluarga
5. Program Pelatihan Bagi Penyandang Disabilitas termasuk pendampingan bagi penyandang disabilitas jiwa sebanyak 95 orang
6. Program Bantuan bagi Lanjut Usia Terdampak Bencana sebanyak 435 orang.

**Tabel 3.12**  
Jumlah PMKS dan Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Kesejahteraan Sosial agar Mandiri Tahun 2019

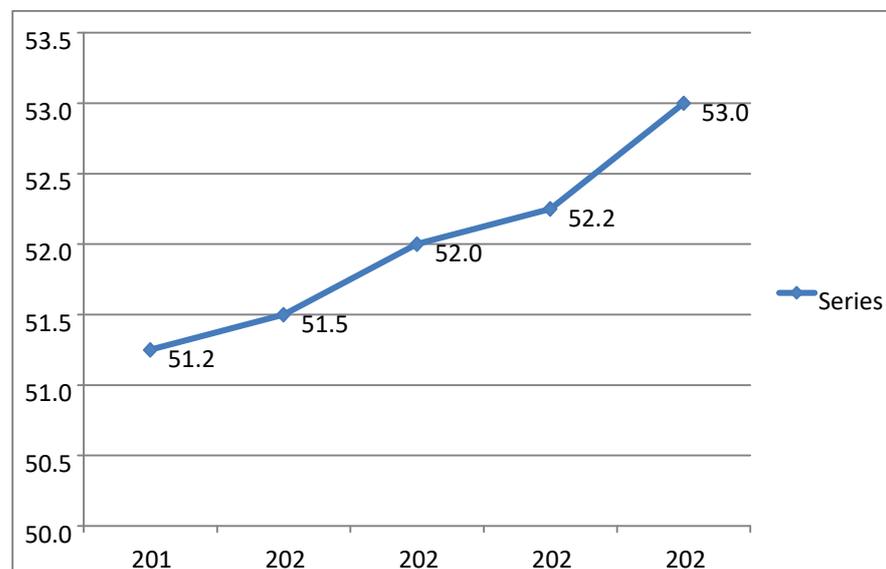
No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS (Jiwa)	Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Kessos agar mandiri (Jiwa)	Persentase
1.	Anak Terlantar	192	6	3,13
2.	Anak Berhadapn dengan Hukum	14	14	100
3.	Anak dengan kedisabilitas	145	-	0

No	Jenis PMKS	Jumlah PMKS (Jiwa)	Jumlah PMKS yang mendapat Bantuan Kessos agar mandiri (Jiwa)	Persentase
4.	Lanjut Usia Terlantar	3.263	435	13,3
5.	Penyandang Disabilitas	1.424	95	6,67
6.	Korban Bencana Alam	291	291	100
7.	Korban Bencana Sosial	136	136	100
8.	Pengemis	7	7	100
9.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	277	2	0,72
10.	Fakir Miskin	142.148	74.632	52,50
11.	Komunitas Adat Terpencil	972	540	55,6
<b>Total</b>		<b>148.869</b>	<b>76.151</b>	<b>51,15</b>

Proyeksi di 5 (lima) tahun kedepan, jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial agar bisa menjadi mandiri diupayakan untuk terus ditingkatkan, dengan asumsi dasar bahwa jika kemudian PMKS ini diberi bantuan melalui program kesejahteraan sosial, maka akan semakin banyak PMKS yang mandiri dan bebas dari kemiskinan, kecacatan, keterbelakangan dan keterisolasian melalui program yang bersifat lintas sektor dan lintas stakeholders.

**Grafik 3.3**

Target Pencapaian Kinerja Peningkatan Jumlah PMKS yang menerima Bantuan Sosial untuk mandiri



#### ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah pengangguran/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran, TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Data tingkat pengangguran terbuka bersumber dari BPS (kabupaten Kapuas dalam angka 2019). Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja berjumlah 7.334 dipersentasekan dalam 100% dan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja berjumlah 179.696 sehingga menghasilkan 4,08 % tingkat pengangguran terbuka untuk tahun 2019.

Penyebab tidak tercapainya target tingkat pengangguran terbuka di antaranya sebagai berikut.

- a. Kurang aktifnya pemberi kerja melaporkan penempatan tenaga kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan pihak terkait lainnya
- b. Keahlian dan kemampuan pencari kerja yang masih belum mumpuni dalam menghadapi daya saing dan perkembangan teknologi modern dalam dunia kerja

Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan untuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut.

- a. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran terbuka diperlukan koordinasi dan sinergi yang baik dengan sektor/instansi terkait.
- b. Pemberi kerja (perusahaan) wajib aktif dalam melaporkan penempatan tenaga kerjanya kepada Dinas Tenaga Kerja dan instansi terkait lainnya dalam upaya penyesuaian data.
- c. Meningkatkan jumlah tenaga kerja profesional dan berkeadilan didukung dengan keterampilan (Skill). Pelatihan mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Didukung dengan pengetahuan skill dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan maupun kursus.

Perusahaan sebagai pemberi kerja dapat memberikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja baik memberikan informasi kepada dinas tenaga kerja maupun memberikan informasi secara langsung maupun tidak langsung melalui media yang saat ini mudah didapat semua orang.

Realisasi Capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni meningkatnya daya saing tenaga kerja. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing tenaga kerja

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.13**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya daya saing tenaga kerja

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,40	69,55	<b>103,18 %</b>

Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Mengindikasikan besarnya persentase tingkat partisipasi angkatan kerja serta peningkatan

kerja yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mendorong peningkatan jenjang pendidikan dan kualitas kerja.

Data tingkat partisipasi angkatan kerja bersumber dari BPS (kabupaten Kapuas dalam angka 2019) jumlah penduduk angkatan kerja berjumlah 179.969 di persentase kan dalam 100% dan dibagikan dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang berjumlah 258.776 sehingga persentase tingkat partisipasi angkatan kerja mencapai angka 69,55% pada tahun 2019.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian target yaitu :

- a. Proaktifnya pemberi kerja dalam melaporkan penempatan kerja kepada dinas tenaga kerja Kabupaten Kapuas dan pihak terkait.
- b. Pencari kerja sangat mudah mendapatkan informasi lowongan kerja melalui media baik melalui media cetak maupun media online.
- c. Turut sertanya keterlibatan pihak terkait dalam meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan pencari kerja yang mendorong pencari kerja dapat bersaing sebagai pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia kerja standar kompetensi nasional.

Dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kapuas, maka diperlukan dukungan dari sektor lain untuk saling mendukung dan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan. Seperti juga para pemberi kerja yang telah ditempatkan, dapat melaporkan penempatannya Pada dinas tenaga kerja Kabupaten Kapuas dan penyesuaian data dengan instansi terkait lainnya sehingga adanya kesesuaian data tenaga kerja.

Tujuan  
2

## Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan

Kemandirian ekonomi merupakan sebuah pendekatan untuk mencapai sejumlah tujuan simultan yang membawa lebih dekat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Peningkatan ekonomi berbasis potensi sumber daya alam dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas-luasnya yang berbasis pada usaha agrobisnis. Keberdayaan kemandirian ekonomi Kapuas harus dapat mencerminkan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja meningkatkan kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan digunakan 2 (dua) indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Capaian kinerja ke-2 indikator tersebut sebagai berikut.

**Tabel 3.14**

Capaian kinerja meningkatkan kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,82	7,16	<b>92,00 %</b>
2	Indeks Gini	0,2983	0,328	<b>90,00 %</b>

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara data statistik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan dari angka 7,01 di tahun 2018 naik menjadi 7,16 pada tahun 2019. Namun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan berhubung Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat optimis dalam penetapan target laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019.

Dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun selanjutnya setiap perangkat daerah terkait yang memberi kontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan terus bekerja secara optimal untuk dapat mencapai target tahun selanjutnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas.

Realisasi Capaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, meningkatnya penanaman modal di kabupaten kapuas, dan meningkatnya kapasitas fiskal daerah. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah diukur berdasarkan pencapaian 4 (empat) indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.15**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20,69 %	20,23 %	<b>97,77 %</b>
2	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	12,00 %	11,53 %	<b>96,08 %</b>
3	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,87 %	6,38 %	<b>&gt;100 %</b>
4	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,03 %	16,27 %	<b>101,00 %</b>

### Analisis Indikator Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB total Kabupaten pada tahun 2018 mencapai 20,23% atau sebesar 97,78%. Terdapat deviasi sebesar 0,46% dari target yang telah ditetapkan. Sektor pertanian dalam hal ini meliputi subsektor tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan. Sektor tanaman pangan menyumbangkan nilai PRDB terbesar (39,60%), diikuti sektor perkebunan (32,77%), peternakan (13,37%), tanaman hortikultura (8,06%) dan jasa pertanian dan perburuan (6,20%). Subsektor tanaman pangan juga berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB Kabupaten pada Tahun 2019.

Terjadi peningkatan PDRB sektor pertanian sebesar 9,02% dibandingkan tahun sebelumnya, namun laju peningkatannya masih di bawah laju pertumbuhan PDRB Kabupaten sebesar 11,18%. Peningkatan terbesar terjadi pada subsektor peternakan dan jasa pertanian dan perburuan, sedangkan yang paling lambat adalah subsektor perkebunan dan diikuti subsektor tanaman hortikultura.

Pendekatan PDRB sektor pertanian dilakukan melalui data produksi yang dikurangi biaya produksi yang dikonversikan dalam nilai rupiah, sehingga naik turunnya PDRB erat kaitannya dengan capaian produksi pada tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan peningkatan PDRB, berdasarkan data produksi komoditas pertanian tahun 2018 terjadi peningkatan produksi pada komoditas-komoditas strategis sektor pertanian. Produksi padi mengalami peningkatan sebesar 4,8%, komoditas buah-buahan 8,2%, komoditas sayur-sayuran 3,5%, demikian juga dengan komoditas karet 14,9%, kelapa sawit rakyat 19,4%, kelapa dalam 9,7%, peternakan 5,4%. Namun, bila dibandingkan dengan sektor lain, laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian dapat dikatakan lebih lambat. Penyebabnya adalah (1) Usaha budidaya pertanian masih didominasi teknologi sederhana, dimana penggunaan varietas unggul masih dibawah 80%, produktivitas lahan rendah, dan pemanfaatan teknologi alat/mesin pertanian masih terbatas (2) Sebagian besar belum berorientasi pada pengembangan korporasi atau peningkatan nilai tambah, (3) Sarana dan prasarana infrastruktur dasar lahan dan air minim, dan (4) Merupakan sektor yang paling rentan terhadap dampak iklim dan perubahan cuaca.

Dalam upaya untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian melalui peningkatan produksi komoditas-komoditas utama pertanian, dilaksanakan beberapa program unggulan antara lain sebagai berikut :

- (1). Penyebarluasan penggunaan varietas padi unggul spesifik lokalita yaitu varietas IPB 1 R Dadahup melalui kegiatan-kegiatan antara lain pengembangan cluster padi IPB 1 R Dadahup, bantuan benih padi, optimalisasi Balai Benih dan Penangkar. Sasaran utama program ini adalah kelompok tani di wilayah sentra produksi padi lokal dalam rangka meningkatkan produktivitas hasil melalui perbaikan hasil per satuan hektar dan peningkatan indeks pertanaman. Disamping itu, dilaksanakan juga program regular pengembangan padi seluas 6.706 Ha yang didanai baik dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.



Gambar 7. Pengembangan Kawasan IPB 1 R Dadahup di Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak



Gambar 8. Pengembangan Kawasan IPB 1 R Dadahup di Kelurahan Sei Pasah Kecamatan Kapuas Hilir

- (2) Pengembangan hortikultura dengan membangun/inisiasi sentra-sentra baru di wilayah potensi. Komoditas yang diprioritaskan seperti aneka cabai dan bawang merah yang merupakan komoditas yang rentan terhadap inflasi mulai dikembangkan secara konsisten di Kabupaten Kapuas dan diperluas jangkauan budidayanya tidaknya di daerah pasang surut tetapi juga di wilayah non pasang surut. Pengembangan komoditas hortikultura pada Tahun 2019 sebesar 106 Ha yang didanai dari APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Komoditas-komoditas tersebut antara lain bawang merah, aneka cabai, sayuran organik, sayuran dataran rendah, buah semusim, sayuran dan buah di lahan kering.



Gambar 9. Pengembangan Bawang Merah di Kecamatan Dadahup



Gambar 10. Pengembangan Cabai di Kecamatan Pulau Petak

- (3) Pengembangan komoditas perkebunan rakyat pada tahun 2019 seluas 178 Ha terdiri atas komoditas kelapa dalam (20 Ha), kelapa sawit (10 Ha), karet (10 Ha) dan kopi (138 Ha). Peningkatan produksi komoditas perkebunan tidak lepas dari kinerja perusahaan besar swasta yang bergerak dalam industri kelapa sawit. Produksi sawit PBS berkontribusi lebih dari 90% produksi sawit total Kabupaten Kapuas.



Gambar 11. Bantuan Bibit Karet Unggul di Kecamatan Basarang

- (4) Pengembangan peternakan melalui program pendistribusian ternak (sapi, kambing, babi, ayam dan itik) ke masyarakat dan inseminasi buatan dalam rangka peningkatan populasi ternak di masyarakat. Disamping itu, program inisiasi pembibitan sapi di masyarakat terus dilanjutkan sebagai cikal bakal pembentukan cluster pembibitan sapi yang mandiri sehingga dapat menopang kebutuhan daging dalam daerah tanpa harus bergantung lebih banyak dari ternak luar daerah.



Gambar 12. Kelompok Tani Pelaksana Kegiatan Inisiasi Pembibitan Sapi dimasyarakat

### Analisis Indikator Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB

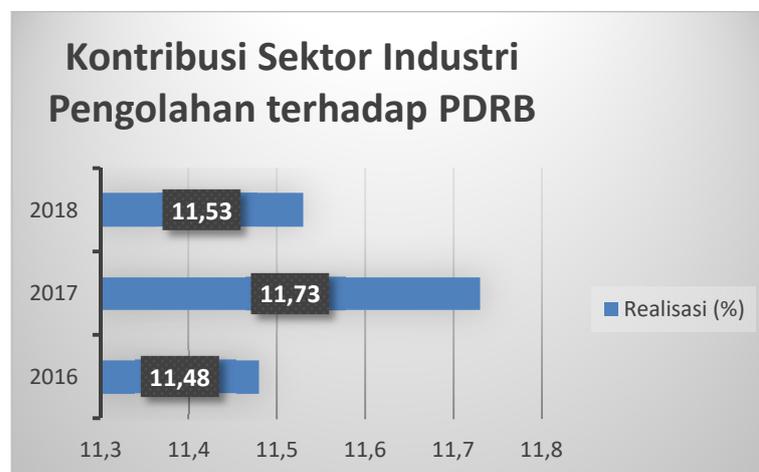


Gambar 13. Pelatihan pengolahan dodol nanas

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 12% kontribusi sektor pengelolaan terhadap PDRB dapat terealisasi sebesar 11,53%. Capaian ini juga lebih rendah dibandingkan capaian kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun 2017.

**Grafik 3.4**

Perkembangan capaian indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari Tahun 2016-2018



Dari diagram di atas dapat dilihat terjadi penurunan kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,20% hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana penunjang serta masih kurangnya pembinaan dan pendampingan pada sektor ini. Untuk perlu lebih meningkatkan pembinaan sumber daya manusia melalui adanya pelatihan dan penyediaan sarana prasarana penunjang untuk sektor industri pengolahan.

### **Analisis Indikator Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB**

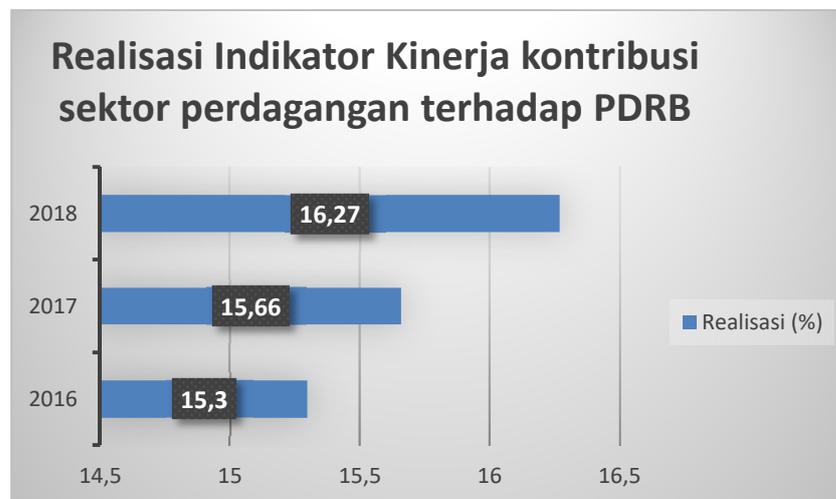
Berdasarkan Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah pada indikator kinerja Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB dapat terealisasi sebesar 6,38% atau dengan capaian 131 %. Realisasi kinerja tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 4,87%.

### **Analisis Indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB**

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 16,03% kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat terealisasi sebesar 16,27% atau dengan capaian 101%. Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan capaian kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada Tahun 2016-2017.

**Grafik 3.5**

Perkembangan capaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dari Tahun 2016-2018



Dari diagram di atas dapat dilihat terjadi Peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,20% hal ini disebabkan oleh pada sektor perdagangan didominasi oleh nilai ekspor dan impor yang cukup signifikan masing masing 61,03% untuk ekspor dan 59,49% untuk impor untuk tahun 2018. Untuk perlu lebih meningkatkan pencapaian kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB maka perangkat daerah akan meningkatkan : pengawasan, monitoring, pembinaan, promosi produk dalam negeri dan sarpras perdagangan.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat diukur berdasarkan pencapaian 2 (dua) indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.16**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor PPH Ketersediaan	80,2	82,5	<b>102,00 %</b>
2	Skor PPH Konsumsi	85,5	77,8	<b>90,99 %</b>

### Analisis Indikator Skor PPH Ketersediaan

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya (FAO-RAPA, 1989). Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. PPH disusun dengan tujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutrition balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestibility*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

PPH Ketersediaan dihitung menggunakan data ketersediaan energi 11 kelompok bahan makanan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dikelompokkan kembali menjadi 9 kelompok dalam perhitungan PPH Ketersediaan pada setiap tahunnya. PPH yang dihasilkan akan memberikan gambaran kualitas keragaman makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.

Kegunaan PPH tingkat ketersediaan itu menilai/mengevaluasi ketersediaan pangan yaitu:

- Untuk mengetahui situasi ketersediaan aktual dengan angka kecukupan energi (AKE);
- Untuk mengetahui kontribusi ketersediaan energi (% AKE) aktual dengan komposisi energi harapan (PPH);
- Untuk mengetahui skor PPH aktual dengan yang diharapkan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Target Skor PPH Ketersediaan Tahun 2019 sebesar 80,2 dan berdasarkan Data hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) di peroleh realisasi Skor PPH Ketersediaan tahun 2019 sebesar 82,5 mengalami kenaikan 2,3 ( 2,8 % ) dari target. Walaupun mengalami kenaikan angka PPH Ketersediaan tersebut masih di bawah skor PPH ideal 100 (tingkat nasional) berdasarkan sisi ketersediaan pangan.

Peningkatan skor PPH Ketersediaan Tahun 2019 karena meningkatnya ketersediaan pangan per kapita dalam bentuk energi yaitu 3.465 kkal/kap/hr yang salah satunya peningkatan skor pada kelompok padi - padian sebesar 2.481 kkal/kap/hr dimana meningkatnya ketersediaan energi ini dipengaruhi peningkatan produksi padi Kabupaten Kapuas tahun 2018 sebesar 404.201 ton.

Dalam rangka mencapai target kinerja pada tahun selanjutnya diperlukan strategi dan langkah kongkrit perbaikan antara lain yaitu:

- a. Untuk mencapai skor PPH Ketersediaan yang ideal diperlukan dukungan dari semua sektor /instansi terkait dalam hal peningkatan produksi tanaman khususnya tanaman pangan selain padi-padian, peningkatan produksi komoditas hortikultura dan bimbingan teknis budidaya untuk kelompok wanita dalam pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga yang seimbang dan beragam. Peningkatan produksi dari sector perikanan dan peternakan untuk meningkatkan ketersediaan protein.
- b. Meningkatkan koordinasi tim lintas sektor antar instansi /perangkat daerah terkait dalam penyediaan data-data pokok sebagai bahan penyusunan NBM dan PPH ketersediaan.
- c. Meningkatkan dukungan dan komitmen dari semua pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.
- d. Peningkatan kemampuan dan kualitas Sumber Daya manusia (SDM) petugas pengolah data melalui pelatihan teknis.
- e. Peningkatan Anggaran untuk peningkatan kinerja Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

### Analisis Indikator Skor PPH Konsumsi

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas`sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Untuk tingkat Nasional telah disepakati susunan Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII tahun 2012 sebagai acuan dalam pembagunan pangan dan gizi. Angka Kecukupan Energi (AKE) di tingkat konsumsi pangan sebesar 2.150 Kkal/kap/hari. Sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) di tingkat konsumsi pangan adalah sebesar 57 gram/kap/hari.

Berdasarkan tabel diatas Skor PPH Konsumsi yang ditargetkan Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2019 adalah sebesar 85,5 sedangkan realisasi indikator kinerja skor PPH Konsumsi adalah sebesar 77,8, Hal ini berarti keragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Kapuas masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut rincian data skor PPH Kabupaten Kapuas Tahun 2019.

**Tabel 3.17**  
Data Hasil Analisis Pola Pangan Harapan Kabupaten Kapuas Tahun 2019

No.	KelompokPangan / JenisPangan	Berat (gr/Kap/Hr)	Energi (Kkal/Kap/Hr )	%AKE	Skor PPH	Kekurangan SkorPPH
1.	Padi-padian	293,4	1.232	54,6	25,0	0,0
2.	Umbi-umbian	52,3	64	3,4	1,5	1,0
3.	Panganhewani	145,5	237	10,8	22,0	2,0
4.	Minyakdanlemak	27,9	250	12,1	5,0	0,0

Sumber: Susenas2019, BPS; diolah BKP Kabupaten Kapuas

Secara umum terlihat bahwa di Kabupaten Kapuas defisit konsumsi pangan sayur dan buah, umbi-umbian, kacang-kacangan, pangan hewani, buah/biji berminyak dan padi-padian secara berurutan dari yang teratas, jika dalam jangka panjang pola konsumsi seperti ini akan memungkinkan terjadi dan berkembangnya masalah-masalah kurang zat gizi mikro atau yang disebut dengan *Hidden Hunger*. Tingkat pendapatan serta pengetahuan gizi yang relatif masih rendah adalah pemicu rendahnya dan belum beranekaragamnya pola konsumsi pangan masyarakat.



Gambar 14. Pelatihan Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2019

Peningkatan ketersediaan pangan untuk menutupi defisit konsumsi pada dasarnya dapat dilakukan melalui peningkatan produksi dalam negeri (intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi maupun rehabilitasi) dan impor. Pengembangan komoditas sayuran dan buah hendaknya diarahkan pada pola jenis buah dan sayuran yang berbasis sumberdaya lokal seperti pisang, jeruk, pepaya serta sayuran hijau dan kacang-kacangan serta kelompok sayuran yang relatif tidak tergantung musim, mudah dibudidayakan dan daya terima masyarakat cukup tinggi terhadap komoditas tersebut.

Demikian halnya dengan pangan hewani, tingkat konsumsi ikan rata-rata masih rendah, padahal ikan merupakan jenis pangan hewani yang mempunyai kandungan protein dan berbagai mineral mikro yang cukup tinggi serta kandungan kolesterolnya relatif rendah sehingga sangat baik untuk kesehatan. Untuk telur, daging ruminansia, daging unggas dan susu masih memerlukan peningkatan konsumsi. Namun disadari bahwa peningkatan konsumsi pangan hewani tidak dapat sepenuhnya tergantung pada peningkatan sumber ketersediaan atau produksi di tingkat wilayah rumah tangga, namun memerlukan upaya simultan dengan program peningkatan pendapatan, karena pada kenyataannya bahwa rata-rata harga pangan hewani relatif lebih mahal dibandingkan harga sumber karbohidrat. Pengembangan komoditas umbi-umbian perlu dilakukan melalui penyiapan teknologi budidaya (panen dan pasca panen) serta upaya promosi dan sosialisasi teknologi industri pengolahan.

Langkah-langkah Perbaikan:

- a. Pola Pangan Harapan (PPH) hendaknya dapat dijadikan kebijakan operasional bagi pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan yang dikoordinasikan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

- b. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) sejak usia dini perlu dilakukan melalui sosialisasi dan introduksi pangan lokal non beras.
- c. Dalam upaya meningkatkan konsumsi protein hewani yang berasal dari ikan perlu terus ditingkatkan dan dilanjutkan gerakan gemar makan ikan.
- d. Diharapkan Dewan Ketahanan Pangan dapat lebih efektif dalam mengakomodasikan kepentingan berbagai sektor, tidak hanya sektor pangan pertanian saja, tetapi juga sektor lain terkait dengan perbaikan gizi terutama kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan dan sebagainya.
- e. Diversifikasi konsumsi pangan perlu diiringi dengan pengembangan produk pangan non beras dengan teknologi pengolahan untuk meningkatkan cita rasa dan citra pangan lokal, agar mempunyai daya saing dengan pangan yang telah merasuk dalam pola konsumsi masyarakat. Dengan perbaikan tersebut diharapkan masyarakat tertarik untuk mensubstitusi beras dengan sumber karbohidrat lokal lainnya.
- f. Kerjasama secara terpadu yang dilaksanakan oleh OPD terkait di Kabupaten Kapuas dalam mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan B2SA berbasis pangan lokal kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Penanaman Modal di Kabupaten Kapuas

Pencapaian target kinerja atas sasaran Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.18**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan realisasi investasi	5,72	953	>100 %

Realisasi Kinerja Persentase peningkatan realisasi investasi adalah 952%. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan sebesar 5,72. Realisasi kinerja ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2018 Berikut capaian Realisasi tahun 2018-2019.

**Tabel 3.19**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Nilai Investasi	1.947.872.212.840	18.547.776.937.470

Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kapuas untuk tahun 2019 nilai realisasi investasi yaitu dari izin yang terbit terdiri dari 348 PMDN (dengan investasi Rp. 18.547.776.937.470.00 disebabkan peningkatan nilai investasi dalam kemudahan pengguna untuk memasukkan nilai investasi melalui sistem perijinan secara online yaitu menggunakan *Online Single Submission (OSS)* dari pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,

semua ijin usaha dan komersial/personal yang telah di peroleh dan sesuai bidangnya wajib di daftar ke system OSS.

OSS mempunyai kelemahan dimana data filter data pemohon yang tidak meneruskan proses izin secara berkelanjutan tidak bisa terfilter sehingga angka nilai investasi yang didapat tidak bisa di pilih berdasarkan berkas pemohon yang telah masuk dan telah terverifikasi dan dinyatakan berkas lengkap oleh bidang pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.

#### 4. Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kapasitas fiskal daerah diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.20**  
Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas fiskal daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	6,15	8,56	>100 %

Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kapasitas fiskal daerah dengan indikator kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi 8,56 atau sebesar 139%. Capaian tersebut telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 6,15. Keberhasilan tersebut dikarenakan adanya perubahan regulasi kenaikan tarif pajak dan Retribusi Daerah di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

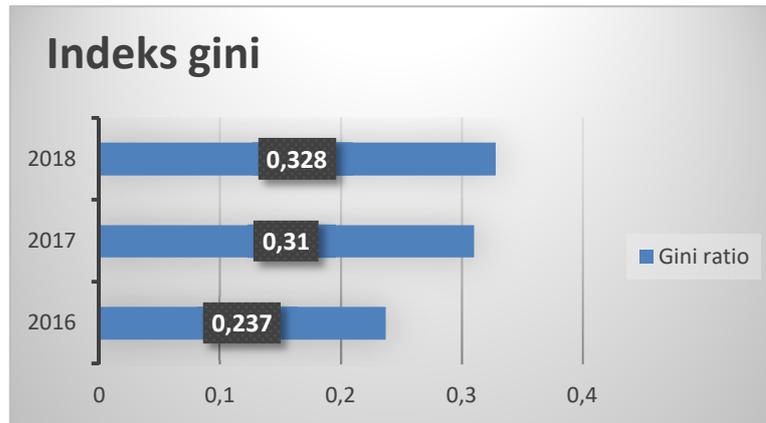
Dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang maka masih diperlukan perubahan regulasi beberapa jenis pajak dan Retribusi Daerah serta meningkatkan penagihan, penyuluhan, update data pajak dan Retribusi Daerah.

#### ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR INDEKS GINI

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja Indeks gini belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 0,2983 dapat terealisasi sebesar 0,328. Dengan capaian ini maka ketimpangan indeks gini masuk dalam kategori sedang. Belum tercapainya target yang ditetapkan dikarena beberapa faktor diantaranya Sumber data untuk tahun 2019 belum dapat disajikan dan belum maksimalnya peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

**Grafik 3.6**

Perkembangan Capaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2016-2018



Sebagaimana diagram di atas dapat dilihat terjadi Peningkatan Indeks gini pada tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya sebesar 0.018%. Pada tahun 2018 indeks gini mencapai 0,328 yang mana masuk kategori ketimpangan sedang dimana 40% penduduk berpenghasilan rendah sebesar 20,51, 40% Penduduk berpenghasilan sedang sebesar 38,22, 20% Penduduk berpenghasilan tinggi sebesar 41,27 (sumber BPS 2018).

Untuk meningkatkan pencapaian kinerja indeks gini dimana semakin kecil nilai indeks gini, semakin kecil ketimpangan pada masyarakat khususnya dalam sektor penghasilan maka perangkat daerah akan meningkatkan : pengawasan barang beredar, monitoring, pembinaan, sarana dan prasarana perdagangan (seperti pasar), kestabilan harga sembako, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Realisasi Capaian indikator kinerja indeks gini dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM serta Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja indeks gini.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.21**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya daya saing koperasi dan UKM

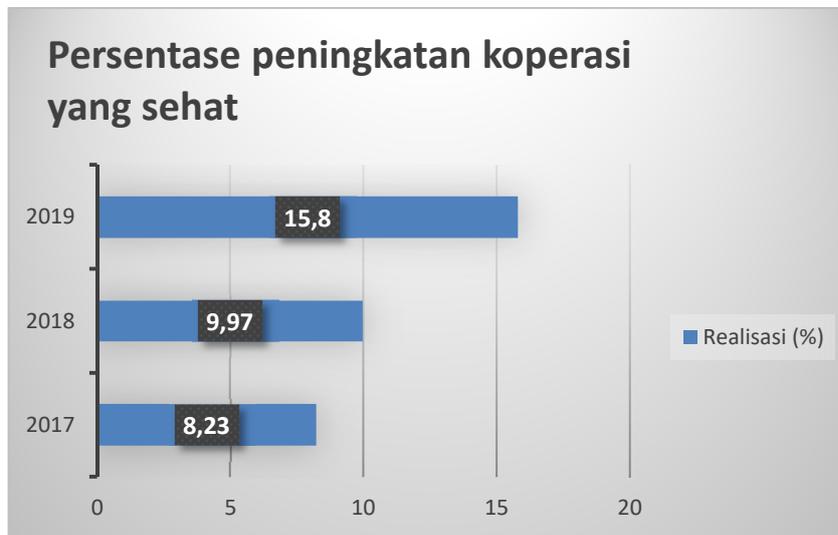
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	3,06	15,8	>100 %
2	Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	58	42,2	72,75 %

### Analisis Indikator Persentase peningkatan koperasi yang sehat

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja persentase peningkatan koperasi yang sehat telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 3,06% dapat terealisasi sebesar 15,8%.

**Grafik3.7**

Perkembangan capaian indikator Persentase peningkatan koperasi yang sehat dari Tahun 2016-2018



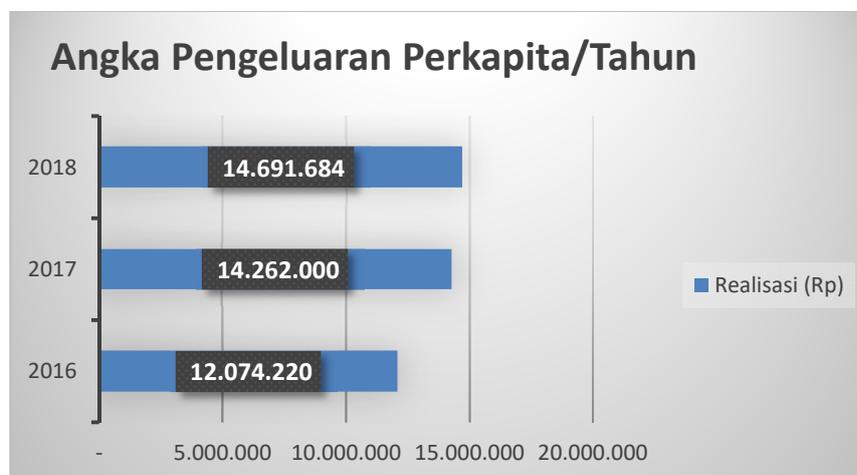
Dari diagram di atas dapat dilihat peningkatan koperasi yang sehat melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya (2017) sebesar 7,57% dan tahun (2018) sebesar 5,8% hal ini disebabkan karena dilakukan pembinaan dan pendampingan pada sektor ini secara terus menerus. Untuk perlu lebih meningkatkan koperasi sehat dilakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan secara kontinu.

#### **Analisis Indikator Pertumbuhan Volume usaha UKM**

Berdasarkan capaian kinerja di atas realisasi indikator kinerja Pertumbuhan Volume usaha UKM belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari target 58% terealisasi sebesar Rp. 42,2. Dengan realisasi tersebut maka capaian indikator kinerja Pertumbuhan Volume usaha UKM hanya dapat dicapai sebesar 72,75%.

**Grafik 3.8**

Perkembangan capaian indikator Angka Pengeluaran Perkapita/Tahun dari Tahun 2016-2018



Dari diagram di atas dapat dilihat Pertumbuhan Volume usaha UKM (%) ada kenaikan sebesar 22,83% pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya (tahun 2018). Walaupun untuk target tahun 2019 tidak dapat di capai. Hal ini disebabkan terkendalanya pendataan di kecamatan dan kurangnya anggaran untuk mendukung sektor ini. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun mendatang diantaranya yaitu dilakukan pendataan di kecamatan.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.22**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa

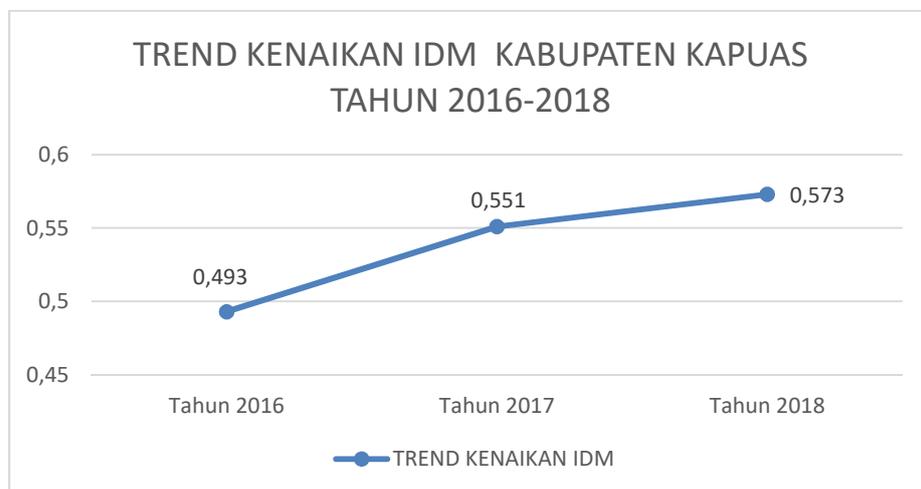
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks desa membangun	0,601	0,573	<b>95,34 %</b>

### Analisis Indikator Indeks Desa Membangun

Berdasarkan informasi diatas dijelaskan bahwa Capaian Kinerja berdasarkan IKU yang telah ditargetkan, realisasinya sudah mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indeks Desa Membangun (IDM) lebih memfokuskan pada upaya penguatan otonomi dan kemandirian Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu penilaian sejauh mana sudah tingkat perkembangan desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang juga sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk Indeks Desa Membangun (IDM) tingkat kabupaten Kapuas sampai dengan tahun 2018 masih dalam posisi Status Desa Tertinggal, walaupun ada perubahan mulai dari desa sangat tertinggal, desa tertinggal, berkembang dan maju, sedangkan untuk desa mandiri belum bisa terpenuhi. Berikut ini kami sajikan trend kenaikan Indeks Desa Membangun(IDM) mulai dari tahun 2016 - 2018 sebagaimana grafik berikut:

**Grafik3.9**

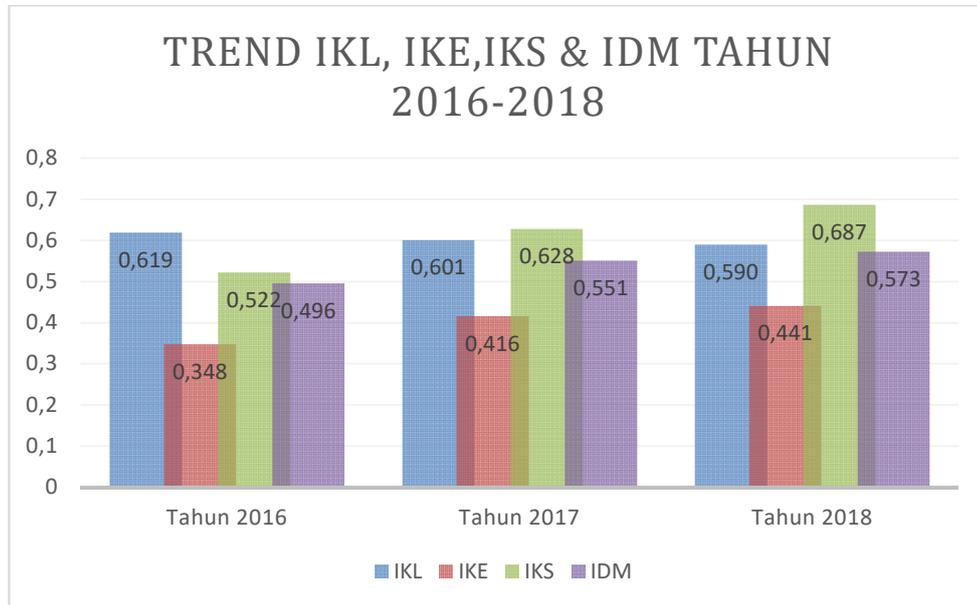
Trend Kenaikan IDM Kabupaten Kapuas



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan IDM Kabupaten Kapuas, walaupun tidak signifikan yang masih dalam posisi Status Desa Tertinggal secara keseluruhan desa yang ada di Kabupaten Kapuas.

**Grafik3.10**

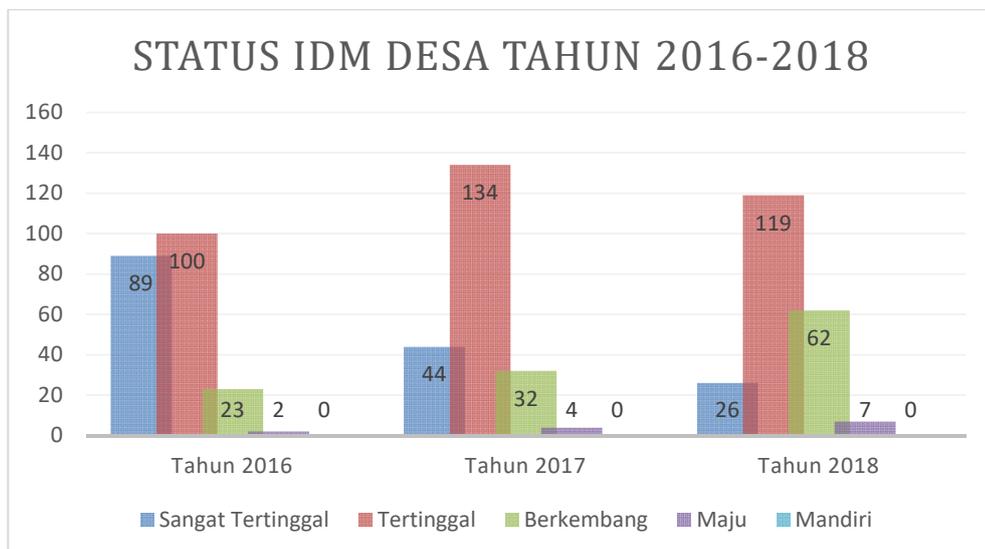
Status Desa di Kabupaten Kapuas



Dari tabel 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa kenaikan IDM Kabupaten Kapuas, dipengaruhi oleh komposit dari Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), yang mana untuk IKL dan IKS sudah cukup memenuhi untuk Status Desa Berkembang, sedang untuk IKE masih berstatus Desa Tertinggal, dengan demikian yang mendapat perhatian lebih untuk ditingkatkan adalah IKE untuk menunjang Status Desa Tertinggal meningkat menjadi Status Desa Berkembang sebagaimana yang telah ditargetkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas maupun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas.

**Grafik3.11**

Status Desa di Kabupaten Kapuas



Dari tabel 2.3 di atas dapat dijelaskan ada penurunan dari Status Desa Sangat Tertinggal menjadi Status Desa Tertinggal, selanjutnya kenaikan Status Desa Berkembang dan Status Desa Maju, sedangkan untuk Status Desa Mandiri masih belum ada. Jadi kesimpulannya dapat diasumsikan bahwa telah terjadi perkembangan perubahan desa mulai dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal dan selanjutnya dari desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa berkembang meningkat lagi menjadi desa maju.

Untuk mewujudkan Status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang berdasarkan data capaian kinerja di atas adalah dengan cara meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) yang masih rendah. Ini dimaksudkan untuk mendongkrak nilai IKE agar dapat meningkat melalui intervensi kepada Pemerintah Desa agar lebih memfokuskan/mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi desa melalui kegiatan antara lain:

- a. Menggali keragaman produk masyarakat desa (produk unggulan desa);
- b. Membangun akses pusat perdagangan (pertokoan dan pasar desa);
- c. Membangun akses distribusi logistik (ekspedisi dan pos keliling);
- d. Mengembangkan akses lembaga keuangan (KUR, KUK dan BANK);
- e. Ketersediaan Lembaga Ekonomi (pengembangan BUMDes dan Koperasi);
- f. Keterbukaan wilayah (membangun angkutan umum, lalu lintas dan jalan desa).

<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat</b>
---------------------	--

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Tujuan ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong kearifan lokal. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Wujud nyata kapasitas masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dari kesetaraan hak perempuan dalam pemerintahan; meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan serta semakin tingginya solidaritas antar golongan (SARA) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Perkembangan ekonomi global juga memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan kapasitas, kemandirian serta daya saing masyarakat sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Untuk mengukur capaian kinerja Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat digunakan 2 (dua) indikator, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Angka Kriminalitas. Capaian kinerja ke-2 indikator tersebut sebagai berikut.

**Tabel 3.23**

Capaian kinerja Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,12	72,32	<b>98,90 %</b>
2	Angka Kriminalitas	3,70	5,68	<b>&gt;100 %</b>

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan tabel capaian kinerja meningkatkan kualitas lingkungan hidup pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat pada indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 dapat terealisasi sebesar 72,32. Realisasi indikator Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 73,12. Kurang tercapainya target tersebut disebabkan faktor indikator kualitas air yang masih rendah sehingga mempengaruhi nilai total IKLH Kabupaten Kapuas.

Untuk memperbaiki capaian kinerja pada tahun mendatang diperlukan langkah-langkah pencapaian kinerja. Perbaikan tersebut diantaranya meningkatkan kegiatan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas air kualitas udara dan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Kapuas.

Realisasi Capaian indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota, meningkatnya kualitas penataan ruang serta meningkatnya pelestarian warisan budaya. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

### 1. Sasaran Strategis Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pencapaian target kinerja atas sasaran Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup diukur berdasarkan pencapaian 3 (tiga) indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.24**

Evaluasi pencapaian sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kualitas Air	48,80	47,50	<b>97,33 %</b>
2	Indeks Kualitas Udara	89,26	95,96	<b>107,00 %</b>
3	Tutupan Lahan	63,22	73,20	<b>115,00 %</b>

### Analisis Indikator Indeks Kualitas Air

Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan maka indikator kinerja indeks kualitas air dapat terealisasi sebesar 47,50 atau dengan capaian sebesar 97,33%. Realisasi ini belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 48,80 dikarenakan masih tingginya pencemaran air di Kabupaten Kapuas.

Peningkatan kinerja pada tahun mendatang maka diperlukan perbaikan sebagai berikut.

1. Perlu dilakukan analisis beban pencemaran dan evaluasi izin pembuangan air limbah.
2. Perlu dilakukan inventarisasi sumber pencemaran baik tertentu (berizin) maupun tak tentu (yang tidak atau belum berizin).
3. Perlu dilakukan pembinaan pengendalian pencemaran air untuk menekan indeks pencemaran air.

### Analisis Indikator Indeks Kualitas Udara

Berdasarkan tabel evaluasi pencapaian sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan indikator indeks kualitas udara dapat terealisasi sebesar 95,96. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa indeks kualitas udara pada tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 89,26. Capaian tersebut tidak terlepas dari mampunya Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019.

Langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya yaitu secara kontinu melaksanakan program dan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui sosialisasi pencegahan karhutla, pembentukan dan pembinaan MPA, serta kampanye pencegahan karhutla.

### Analisis Indikator Tutupan Lahan

Memperhatikan pencapaian atas sasaran menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada indikator indeks kualitas tutupan lahan dapat terealisasi sebesar 73,20. Realisasi tersebut cukup besar mengingat target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 63,22. Indikator indeks kualitas tutupan lahan melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2019, hal ini dikarenakan dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan penataan ruang maupun penegakan hukum di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh instansi yang berwenang.

Langkah perbaikan dalam pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya secara kontinu melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas tutupan lahan di Kabupaten Kapuas.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kebersihan dan Keteduhan Kota

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.25**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor penilaian adipura	75,70	73,56	97%

### Analisis Indikator Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Tabel 3.23 evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota dengan indikator kinerja Skor Penilaian Adipura terealisasi sebesar 73,56. Skor penilaian adipura tersebut masih menggunakan hasil penilaian tahun 2019. Hal tersebut disebabkan belum terbitnya skor penilaian adipura tahun 2020 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dengan skor penilaian sebagaimana diatas belum dapat menggambarkan kinerja Pemerintah Daerah dalam pencapaian indikator skor penilaian adipura. Namun begitu diperlukan berbagai perbaikan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan setiap tahunnya sebagai berikut.

1. Melaksanakan Kebijakan dan strategi Daerah (Jakstrada) Kabupaten Kapuas sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan.

2. Penyesuaian norma standar prosedur dan kriteria pengelolaan sampah.
3. Meningkatkan pengelolaan pada masing-masing titik pantau adipura sesuai dengan standar penilaian Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
4. Mensosialisasikan serta mengedukasi pengelolaan sampah kepada pihak – pihak penghasil sampah dan TPA dengan *System Control Landfill*.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.26**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penataan ruang

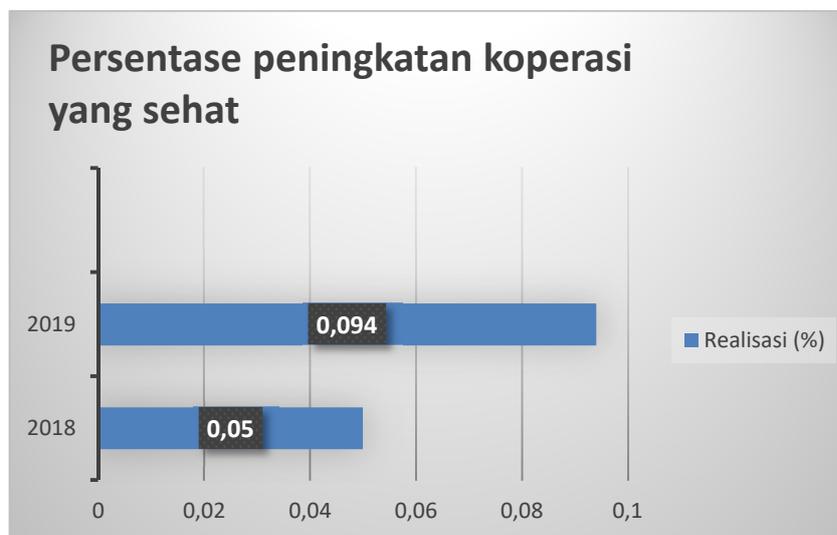
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	8,32	0,094	<b>2,00 %</b>
2	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	33,06	5,086	<b>16,00 %</b>

#### Analisis Indikator Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Realisasi indikator kinerja Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang sebesar 0,094%. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 8,32%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata-rata meningkatnya kualitas penataan ruang berada di kisaran 0,094%. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dari tahun 2017-2019.

**Grafik3.12**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dari Tahun 2017-2019



Sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan target kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi Perda RT/RW Kab. Kapuas ke masyarakat luas.
2. Meningkatkan Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi.

### **Analisis Indikator Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Kawasan Terbangun**

Realisasi indikator kinerja Persentase Ruang terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun sebesar 5,086%. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 33.06 %. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Meningkatnya kualitas penataan ruang berada di kisaran 5,086%. Berikut perbandingan capaian indicator kinerja Persentase Ruang terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3.27**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase Ruang terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	5,048%	5,066%	5,086%

Beberapa hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target dan sasaran di antaranya adalah sulitnya pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau, sehingga RTH yang di tata dan dipelihara hanya 5,086% dari target 33,06% yang harus dicapai. Sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan target kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau.
2. Anggaran yang sesuai untuk membangun Ruang Terbuka Hijau untuk mencapai target.

#### **4. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya**

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya pelestarian warisan budaya diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.28**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya pelestarian warisan budaya

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah warisan budaya ditetapkan propinsi kalimantan tengah	NA	NA	-
2	Jumlah Kunjungan Wisata	7.000	66.666	>100%

### **Analisis Capaian Kinerja Jumlah Warisan Budaya Ditetapkan Propinsi Kalimantan Tengah**

Sebagaimana tabel evaluasi sasaran meningkatnya pelestarian warisan budaya diatas, indikator kinerja Jumlah warisan budaya ditetapkan propinsi kalimantan tengah

belum terealisasi. Hal ini akan menjadi catatan bagi pemerintah agar adanya percepatan terhadap penetapan warisan budaya oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk tahun 2019 Kabupaten Kapuas telah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sebanyak 5 orang, dimana nantinya akan bertugas memberi rekomendasi kepada Bupati Kapuas untuk penetapan objek diduga cagar budaya menjadi cagar budaya (CB) Tingkat Kabupaten Kapuas. Selanjutnya pada tahun berikutnya akan dilaksanakan pendataan seluruh objek diduga cagar budaya diwilayah Kabupaten Kapuas dan mengusulkan warisan budaya tak benda (WBTB) maupun Objek Diduga Cagar Budaya (OBCB) untuk ditetapkan.

### **Analisis Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata**

Untuk indikator kedua dari pengukuran sasaran meningkatnya pelestarian warisan budayadigunakan indikator Jumlah Kunjungan Wisata. Pada tahun 2019 kunjungan wisata ke kabupaten Kapuas mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 66.666 orang. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebanyak 7.000 orang. Jumlah kunjungan tersebut dapat dirinciWisatawan Nusantara sebanyak 66.584 orang dan Wisatawan Mancanegara sebanyak 82 orang.

Realisasi kinerja tahun 2019 ini juga lebih besar dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2018. Berikut perkembangan jumlah kunjungan wisata dari tahun 2018-2019.

**Tabel 3.29**

Perkembangan capaian persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi dari Tahun 2018-2019

No	Indikator Kinerja	2018	2019
1	Jumlah Kunjungan Wisata	8.734	66.666



Gambar 15. Salah satu objek wisata Betang Sei Pasah yang dapat dikunjungi di Kabupaten Kapuas

### **ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR ANGKA KRIMINALITAS**

Berdasarkan capaian kinerja meningkatkan kualitas lingkungan hidup pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat pada indikator kinerja angka kriminalitas dapat

teralisasi sebesar 5,68. Realisasi indikator kinerja tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 3,70 atau melampaui target sebesar 1,98%.

**Tabel 3.30**  
Data kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2019

No	Jenis Kriminal	2018	2019
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	JUMLAH KASUS NARKOBA	51	51
2	JUMLAH KASUS PEMBUNUHAN	3	7
3	JUMLAH KASUS KEJAHATAN SEKSUAL	16	16
4	JUMLAH KASUS PENGANIAYAAN	29	26
5	JUMLAH KASUS PENCURIAN	88	77
6	JUMLAH KASUS PENIPUAN	8	2
7	JUMLAH KASUS PEMALSUAN UANG	-	-
8	JUMLAH KASUS PIDANA SELAMA 1 TAHUN	320	302
9	JUMLAH PENDUDUK	412.912	412.910
		JIWA	JIWA
10	ANGKA KRIMINALITAS (8)/(9)	1,321	1,246

Disamping itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas jumlah tindak pidana yang terjadi selama tahun 2019 sebanyak 178 tindak pidana. Jumlah tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 184 tindak pidana. Dari jumlah tindak pidana tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah tindak pidana sebanyak 6 tindak pidana.

Pencapaian ini disebabkan antara lain karena hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik
2. Optimalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat
3. Meningkatnya taraf kehidupan masyarakat
4. Koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan pihak-pihak

Untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan program-program penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan pihak-pihak lainnya

Realisasi Capaian indikator kinerja angka kriminalitas dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud yakni Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja angka kriminalitas.

#### **1. Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.31**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Angka konflik	16	5	>100 %
2	Penurunan pelanggaran Perda	126	121	96,03 %

### Analisis Indikator Angka Konflik

Berdasarkan data pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada indikator angka konflik terealisasi sebesar 5 konflik. Realisasi angka konflik tersebut mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 16 konflik. Angka tersebut juga menunjukkan bahwa terjadi penurunan konflik sebesar 68,75%..

Pencapaian target kinerja angka konflik tersebut didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, optimalnya kegiatan-kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di masyarakat, meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, koordinasi yang baik antara aparat keamanan dan pihak-pihak terkait.

**Tabel 3.32**

Jumlah Demo/Unjuk Rasa di Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2019

No	Jenis Demo	2018	2019
1	Bidang Politik	2	-
2	Bidang Ekonomi	-	-
3	Bidang Sosial	1	2
4	Bidang Budaya	1	-
5	Kasus Pemogokan Kerja	1	3
Jumlah Demo/Unjuk Rasa		5	5

### Analisis Indikator Penurunan pelanggaran Perda

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada indikator kinerja penurunan pelanggaran Perda dapat terealisasi sebesar 121. Realisasi ini dianggap belum memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu penurunan pelanggaran Perda sebanyak 126.

**Tujuan**  
4

**Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur**

Kualitas lingkungan hidup sangat memengaruhi keberlanjutan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan harus dijaga agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Tujuan ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih serta mendorong kearifan lokal.

Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat.

Wujud nyata kapasitas masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dari kesetaraan hak perempuan dalam pemerintahan; meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan serta semakin tingginya solidaritas antar golongan (SARA) yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat yang berujung kepada peningkatan kesejahteraan. Perkembangan ekonomi global juga memberikan sinyal akan pentingnya peningkatan kapasitas, kemandirian serta daya saing masyarakat sehingga mampu bersaing di dunia internasional.

Untuk mengukur capaian kinerja meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur digunakan 1 (satu) indikator, yaitu angka konektivitas. Capaian kinerja indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

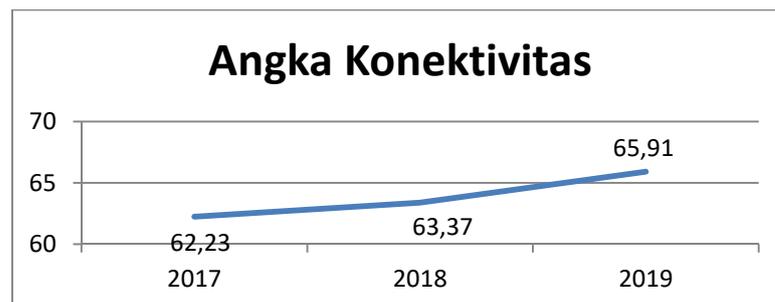
**Tabel 3.33**  
Capaian kinerja meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Angka Konektivitas	66,84	65,91	<b>98,60%</b>

#### ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR ANGKA KONEKTIVITAS

Realisasi indikator kinerja Angka Konektivitas struktur sebesar 65,91 %. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 66.84%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata-rata Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur berada di kisaran 65,91 %. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Angka Konektivitas dari tahun 2017-2019.

**Grafik 3.13**  
Perkembangan capaian indikator angka konektivitas dari Tahun 2017-2019



Beberapa hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target dan sasaran di antaranya adalah Panjang jalan dan jembatan penghubung desa atau kecamatan yang harus ditangani untuk meningkatkan konektivitas terhadap antar wilayah belum ideal dengan kebutuhan pagu dana yang tersedia. Sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan target kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah melakukan kegiatan penanganan dan pemeliharaan pada ruas-ruas jalan maupun jembatan sesuai skala prioritas dan sesuai dengan konstruksi yang tepat agar dapat berfungsi sebagaimana semestinya.

Realisasi Capaian indikator kinerja Angka Konektivitas dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud

meningkatnya konektivitas antar wilayah dan meningkatnya kualitas permukiman. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja Angka Konektivitas.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.34**  
Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	60,14 (1.289,45 Km)	59,39 % (1.273,46 KM)	<b>98,75 %</b>
2	Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	40	46,75	<b>116,00 %</b>
3	Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	83	81,7	<b>98,43 %</b>

#### Analisis Indikator Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Realisasi indikator kinerja Panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 59,39 % (1.273,46 KM). Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 60,14 % (1.289,45 KM). Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Meningkatnya Konektivitas antar wilayah berada di kisaran 59,39 % (1.273,46 KM). Berikut perbandingan capaian indicator kinerja Panjang jalan dalam kondisi mantap dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3.35**  
Perbandingan realisasi indikator kinerja Panjang jalan dalam kondisi mantap dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	57,53 % (1.233,46 KM)	58,46 % (1.253,46 KM)	59,39 % (1.273,46 KM)

Sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan angka harapan hidup dan target kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah Melakukan kegiatan penanganan dan pemeliharaan pada ruas-ruas jalan sesuai skala proiritas dan sesuai dengan konstruksi yang tepat.

#### Analisis Indikator Persentase Desa Dan Kelurahan Yang Terhubung Dengan Moda Transportasi Daratan

Berdasarkan pencapaian sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah pada indikator kinerja persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan terealisasi sebesar 46,75 atau sebanyak 108 Desa terhubung. Capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 40% atau sebesar 90 Desa yang terhubung.

Meningkatnya jumlah prasarana dan aksesibilitas Jalan merupakan salah satu komponen dalam pencapaian target pada indikator sasaran kinerja. Komponen lain yang mendukung pencapaian target ini adalah penambahan jaringan trayek tetap dan teratur serta jaringan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 117 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

**Tabel 3.36**  
Data Desa yang terhubung dengan Kuala Kapuas

No.	Kecamatan	Desa yang terhubung dengan Kuala Kapuas
1	Kecamatan Kapuas Tengah	13 Desa
2	Kecamatan Mantangai	38 Desa
3	Kecamatan Timpah	9 Desa
4	Kecamatan Kapuas Hulu	14 Desa
5	Kecamatan Tamban Catur	10 Desa
6	Kecamatan Pasak Telawang	10 Desa
7	Kecamatan Mandau Talawang	11 Desa
8	Kecamatan Dadahup	13 Desa
9	Kecamatan Bataguh	15 Desa
10	Kecamatan Selat	11 Desa
11	Kecamatan Kapuas Hilir	8 Desa
12	Kecamatan Kapuas Timur	10 Desa
13	Kecamatan Kapuas Kuala	15 Desa
14	Kecamatan Kapuas Barat	11 Desa
15	Kecamatan Pulau Petak	12 Desa
16	Kecamatan Kapuas Murung	21 Desa
17	Kecamatan Basarang	14 Desa

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna dan penyedia jasa transportasi di Kabupaten Kapuas, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah guna mengimbangi lajunya pembangunan prasarana transportasi khususnya jalan, perbaikan pelayanan jasa angkutan, penyediaan dan pembangunan fasilitas bongkar muat/barang dan turun/naik numpang, pemasangan fasilitas keselamatan baik Jalan maupun sungai dan peningkatan sumber daya manusia serta evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan merupakan bagian yang harus dilakukan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dan Pelayanan jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, murah dan mudah dapat terwujud.

#### **Analisis Indikator Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi**

Realisasi indikator kinerja persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi ialah sebesar 81,7%. Realisasi tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 83% pada tahun 2019. Adapun penyebab tidak tercapai target tersebut disebabkan berbagai aspek yang mempengaruhinya sebagai berikut.

1. Aspek program dan kegiatan

Tidak tercapainya target kinerja dikarenakan ada 39 yang tidak terjangkau jaringan telekomunikasi (Blank Spot), melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas telah berupaya dengan mengirimkan usulan 39 titik blank spot Ke Balai Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) yang mempunyai kewenangan serta Leading sektor terkait pembangunan infrastruktur TIK melalui program Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu USO (universal service obligation). Namun hingga saat ini usulan tersebut belum ada tindak lanjut dari BAKTI.

2. Aspek SDM dan penganggaran

Belum optimalnya kinerja karena SDM yang kurang memadai perlu ditindaklanjuti dengan pelatihan dan bimbingan teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya, disamping itu dari segi penganggaran yang memadai, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan baik dari sisi perencanaan dan penganggaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Melalui dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas akan mencanangkan program dan kegiatan Desa bebas buta internet dengan mensosialisasikan layanan jaringan internet berbasis satelit "mangoesky" bekerjasama dengan PT Telkom Persero, yang nantinya implementasi menggunakan dana desa untuk setiap swakelola layanan tersebut dan penggunaan dana desa untuk keperluan pembangunan infrastruktur TIK untuk kepentingan Desa sesuai dengan yang tercantum pada Bab II huruf (d) dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2019.

**Tabel 3.37**

Data Desa dan Kecamatan yang belum terhubung dengan jaringan telekomunikasi

No	Kriteria	Informasi	Keterangan
1	Jumlah Desa Blank Spot	39 Desa	Lahei Mangkutup
			Masupa Ria
			Batapah
			Barungan I
			Barongan li
			Sei Ringin
			Lawang Kamah
			Tumbang Randang
			Buhut Jaya
			Masaran
			Manis
			Karukus
			Basuta Raya
			Rawa Subur
			Lapetan
			Tumbang Muroi
			Sei Ahay
			Sei Gita
			Sei Gawing
			Tumbang Mangkutup
Humbang Raya			
Katimpun			
Pangirang			
Dirung Koram			

No	Kriteria	Informasi	Keterangan
			Hurung Tabengan
			Hurung Tampang
			Tumbang Kuroh
			Tumbang Sirat
			Mapai Jaya
			Tumbang Manyarung
			Tumbang Tihis
			Tumbang Bukoi
			Tanjung Rendan
			Karetau Manta”A
			Petak Puti
			Lawang Kajang
			Batu Sambung
			Tumbang Nusa
2	Jumlah Kecamatan Blank Spot	8 Kecamatan	Mantangai
			Kapuas Murung
			Kapuas Barat
			Pasak Talawang
			Kapuas Hulu
			Kapuas Tengah
			Timpah
			Mandau Talawang

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Permukiman

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kualitas permukiman diukur berdasarkan pencapaian 5 (lima) indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.38**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas permukiman

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	45,89	55,14	<b>120 %</b>
2	Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	55,66	56,17	<b>100 %</b>
3	Persentase rumah layak huni	87,12	87,6	<b>100 %</b>
4	Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	76,34	72,36	<b>94,78 %</b>
5	Rasio Elektrifikasi	75	79,59	<b>106,12%</b>

### Analisis Indikator Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM

Realisasi indikator kinerja Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM sebesar 55,14 %. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 45,89%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM berada di kisaran 55,14 %. Berikut perbandingan capaian indicator kinerja Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM dari tahun 2017-2019.

**Tabel3.39**

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	52,00 %	53,39 %	55,14 %

Beberapa hambatan yang masih terjadi dalam pencapaian target dan sasaran di antaranya adalah kurangnya pendanaan untuk air minum dan Lokasi Perumahan Masyarakat yang terpencar dan saling berjauhan sehingga investasi Infrastruktur cukup mahal. Sebagai langkah perbaikan untuk meningkatkan Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Akan mengadakan survei pada daerah – daerah yang belum terakomodir
2. Mengusulkan tambahan dana dari Pemerintah Pusat Provinsi.
3. Penganggaran Dana Air Minum DAU APBD Kabupaten

### **Analisis Indikator Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik**

Realisasi indikator kinerja Persentase jumlah tangga berakses pengelola air limbah domestik sebesar 56,17 %. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 55,66%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Persentase jumlah tangga berakses pengelola air limbah domestik berada di kisaran 56,17 %. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase jumlah tangga berakses pengelola air limbah domestik melalui SPAM dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3.40**

Perbandingan realisasi indikator kinerja persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Persentase jumlah rumah tangga berakses pengelola air limbah domestik	53,99 %	54,82 %	56,17 %

Sebagai langkah perbaikan untuk target kinerja dimasa yang akan datang Pengelola Air Limbah Domestik diperlukan penyediaan anggaran sesuai kebutuhan yang diperlukan.

### **Analisis Indikator Persentase rumah layak huni**

Realisasi indikator kinerja Persentase rumah layak huni sebesar 87,6%. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 87,12%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Persentase rumah layak huni berada di kisaran 87,6%. Berikut perbandingan capaian indicator kinerja Persentase rumah layak huni dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3.41**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase rumah layak huni dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Persentase rumah layak huni	85,83 %	86,52 %	87,6 %

Sebagai langkah perbaikan untuk kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah Meningkatkan upaya pencapaian indikator-indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun atau Meningkatkan Kualitas Rumah secara Swadaya, dan dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

### **Analisis Indikator Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan**

Realisasi indikator kinerja Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan sebesar 72,36 %. Realisasi ini telah mencapai target kinerja yang ditetapkan 76,34%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi kinerja pada Tahun 2017-2019, dimana rata Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan berada di kisaran 72,36 %. Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan dari tahun 2017-2019.

**Tabel 3.42**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan dari Tahun 2017-2019

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019
1	Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	77,01 %	72,36 %	72,36 %

Sebagai langkah perbaikan untuk target kinerja dimasa yang akan datang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Langkah berikutnya untuk penanganan kawasan permukiman data-data akurat pada seluruh kawasan kota sehingga dapat diperhitungkan untuk penyelesaian penurunan kawasan kumuh.
2. Perlunya ada dukungan dari masyarakat untuk menghilangkan budaya pembangunan sampah sembarangan sehingga tidak terlihat lagi kawasan kumuh
3. Untuk mencapai target penurunan kawasan kumuh diperlukan penyediaan anggaran sesuai kebutuhan yang diperlukan.

## Analisis Indikator Rasio Elektrifikasi

Rumah tangga berlistrik berjumlah 81.828 dibandingkan seluruh rumah tangga yakni 102.808. Sehingga tahun 2019 presentase rumah tangga berlistrik dapat terealisasi sebesar 79,59%. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya yakni 75%. Hal ini terjadi dikarenakan lancarnya pembangunan jaringan PLN, yang berarti pula berhasilnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah Kecamatan dan Desa serta masyarakat setempat dalam program listrik desa.

Upaya perbaikan pada tahun mendatang adalah perlu diintensifkan pendataan warga belum berlistrik, termasuk survei rutin terhadap kondisi kelistrikan di desa dan mensinergikan dengan program-program pemerintah terkait peningkatan rasio elektrifikasi.

**Tujuan  
5**

**Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat**

Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi. Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Situasi dan kondisi ini menuntut adanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi sehingga mampu menjawab tantangan Kabupaten Kapuas di masa mendatang.

Untuk mengukur capaian kinerja terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat digunakan 1 (satu) indikator, yaitu indeks reformasi birokrasi. Capaian kinerja indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3.43**

Capaian kinerja terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	45	65,39	>100

### ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR INDEKS REFORMASI BIROKRASI

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa realisasi indikator kinerja indeks reformasi birokrasi pada Tahun 2019 sebesar 65,39 dari target sebesar 45 atau dapat dicapai 145%. Realisasi kinerja tersebut diukur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB online). Penilaian ini digunakan sebagai ukuran kinerja, mengingat tidak dikeluarkannya hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb). Hal itu dikarenakan adanya keterlambatan dalam pelaksanaan evaluasi dan penyampaian hasil evaluasi mandiri sebagaimana waktu yang telah ditentukan.

Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas dilakukan terhadap penerapan reformasi birokrasi tingkat pemerintah daerah dan kepada 10 (sepuluh) sampel perangkat daerah. Dari penilaian tersebut diperoleh nilai Indeks reformasi birokrasi sebesar 65,39 atau dalam kategori B. Penilaian ini lebih baik dibandingkan penilai pada

tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemenpanrb yaitu sebesar 56,18. Berikut perbandingan indeks reformasi birokrasi dari tahun 2018-2019.

**Tabel 3.44**  
Perbandingan indeks reformasi birokrasi dari tahun 2018-2019

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
<b>1. Komponen Pengungkit</b>				
1	Manajemen perubahan	5	1,80	4,32
2	Penataan peraturan perundang-undangan	5	1,66	4,25
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	3,18	6
4	Penataan Tatalaksana	5	2,12	3,27
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	8,77	11,94
6	Penguatan Akuntabilitas	6	2,53	5,53
7	Penguatan Pengawasan	12	3,63	5,76
8	Peningkatan kualitas pelayanan Publik	6	3,47	4,93
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60</b>	<b>27,16</b>	<b>46,01</b>
<b>2. Komponen Hasil</b>				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	8,56	8,86
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	3,70	0
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,75	0
4	Opini BPK	3	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	8,01	7,7
<b>Total Komponen hasil (B)</b>		<b>40</b>	<b>29,02</b>	<b>19,38</b>
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)</b>		<b>100</b>	<b>58,18</b>	<b>65,39</b>



Gambar 16. Sosialisasi Penerapan Reformasi Birokrasi dan Roadmap Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Beberapa upaya pada tahun 2019 dilakukan untuk mempercepat penerapan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan perangkat daerah. Upaya tersebut

dilaksanakan melalui koordinasi tim reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor 334/Org Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023. Upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Penetapan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 443/Org Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2023.
2. Sosialisasi penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023.
3. Penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas dan perangkat daerah dengan penyelarasan kinerja dan coaching clinic dgn Kemenpanrb.
4. Melaksanakan evaluasi kelembagaan perangkat daerah tahun 2019.
5. Penerapan sistem promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.
6. Asesmen dan pemetaan kompetensi terhadap pejabat administrator.

Realisasi Capaian indikator kinerja indeks reformasi birokrasi dipengaruhi oleh capaian kinerja sasaran strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Sasaran strategis dimaksud meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berikut dijelaskan analisis atas capaian setiap sasaran terhadap indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.45**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini BPK	WTP	WTP*	<b>100%</b>
2	Nilai SAKIP	67,00 (B)	64,75 (B)	<b>96,64%</b>

\* Opini BPK pada Tahun 2018

#### Opini BPK

Berdasarkan evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah maka realisasi indikator opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 mendapatkan Opini WTP. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2019. Disamping capaian itu terdapat beberapa catatan dari BPK yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yaitu :

- a. Barang milik daerah di perangkat daerah ada beberapa yang masih dibawa pegawai yang pensiun sehingga perlu ditindak lanjuti agar keberadaan barang milik daerah dapat terinventaris dengan baik sesuai dengan aturan dan pelaporannya.

- b. Barang milik daerah yang kondisinya telah rusak berat agar segera dilakukan proses penghapusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas yang belum mempunyai dokumen kepemilikan/sertifikat untuk segera dilakukan proses pensertifikatan.



Gambar 17. Bupati Kapuas menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemda Tahun Anggaran 2018

Dengan beberapa catatan tersebut diatas, Sebagai langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan melalui Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah yaitu:

- a. Dengan memerintahkan Perangkat Daerah untuk membuat surat penarikan Barang Milik Daerah kepada pegawai yang pensiun di masing-masing dinas serta melakukan inventarisasi barang milik daerah sesuai dengan data pada laporan masing-masing Perangkat Daerah.
- b. Melaksanakan proses penghapusan dengan memerintahkan Perangkat Daerah untuk segera mengusulkan proses penghapusan dan memasukkan kedalam RKBMD penghapusan.
- c. Membuat surat ke Perangkat Daerah untuk melakukan Pensertifikatan dan agar bekerjasama dengan BPN dan instansi teknis terkait dalam penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kapuas.

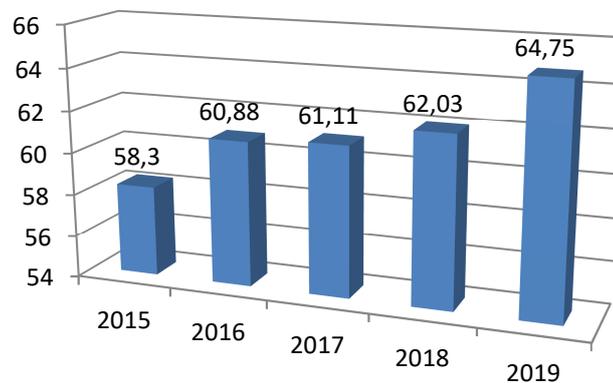
### **Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)**

Salah satu alat ukur dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah adalah dengan menggunakan indikator Nilai SAKIP. Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian dari evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tingkat pemerintah daerah.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kapuas memperoleh nilai SAKIP sebesar 64,75 atau dalam kategori B. Capaian ini belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Namun capaian pada tahun 2019 mengalami peningkatan secara terus menerus sejak tahun 2015-2019.. Jika dibandingkan dari beberapa tahun sebelumnya, terlihat ada peningkatan nilai SAKIP sebesar 2,75 dibandingkan pada Tahun 2018 yang hanya mengalami kenaikan sebesar 0,92. Berikut realisasi capaian indikator kinerja nilai SAKIP dari tahun 2015-2019.

**Grafik3.14**

Perbandingan realisasi indikator kinerja Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Tahun 2015-2019



Untuk merealisasikan capaian kinerja tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas pada tahun 2019 telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan penerapan SAKIP di tingkat pemerintah daerah maupun di tingkat perangkat daerah. Beberapa upaya tersebut diantaranya adalah :

1. Melaksanakan penyesuaian kinerja pada saat penyusunan RPJMD dan Renstra periode 2018-2023 pada seluruh perangkat daerah;
2. Menyelenggarakan pendampingan/*coaching clinic* dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Evaluasi mandiri Inspektorat Kabupaten Kapuas atas penerapan SAKIP di perangkat daerah;
4. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
5. Menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 545 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan hasil yang baik namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Berikut secara singkat hasil evaluasi tahun 2019.

1. Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi yang kami sampaikan pada tahun sebelumnya, salah satunya ditunjukkan dengan perbaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah.
2. Perbaikan IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan seperti rencana strategis dan perjanjian kinerja, namun demikian pemanfaatannya belum terlihat secara jelas untuk memperbaiki upaya perencanaan kegiatan yang mengarah pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Pemkab. Kapuas telah melakukan penjabaran kinerja kepala daerah pada level jabatan paling rendah, namun penyusunan IKU tersebut belum mendasarkan pada keterkaitan proses kerja serta tugas fungsi dan peran yang diemban oleh setiap jabatan. Hal tersebut mengakibatkan masih ditemukan kinerja yang tidak sesuai dengan levelnya. Selain itu, mekanisme penjabaran kinerja yang tidak berpedoman pada proses bisnis organisasi.

4. Laporan Kinerja telah disusun oleh seluruh Perangkat Daerah, namun masih banyak mengungkapkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, bukan pada analisis pencapaian kinerja dan analisis efektifitas penggunaan sumberdaya, selain itu, mekanisme pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum dapat diandalkan.
5. System pemantauan kinerja belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan.
6. Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, belum kepada hasil program sehingga masih ditemui ketidaksielarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang diemban oleh setiap Perangkat Daerah.
7. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Inspektorat belum mampu menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di level Perangkat Daerah. Hal tersebut dikarenakan tingkat pemahaman evaluator terhadap SAKIP yang belum maksimal sehingga belum mampu memanfaatkan instrument evaluasi dan penerapan professional judgments secara tepat untuk memicu perbaikan penerapan SAKIP di Lingkungan internal Perangkat Daerah.



Gambar 18. Sekretaris Daerah Kab. Kapuas menerima hasil evaluasi SAKIP Tahun 2019

Berdasarkan beberapa hasil evaluasi tersebut, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyempurnaan pada Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sampai dengan level jabatan paling rendah sehingga dapat tercipta keselarasan penjabaran (*cascade*) kinerja dari level pemerintah kabupaten sampai keindividu pegawai;
2. Penjabaran kinerja agar dibangun berdasarkan peta proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam penyusunan IKU;
3. Melaksanakan pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi kinerja yang telah disusun, dengan memanfaatkan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana pemantauan kinerja dan evaluasi oleh pimpinan, juga sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*. Adanya aplikasi juga diharapkan dapat diwujudkan mekanisme pengumpulan kinerja yang semakin andal serta meningkatkan kualitas laporan kinerja. Selanjutnya, diharapkan aplikasi tersebut dapat mengintegrasikan informasi keuangan dengan pencapaian kinerja.
4. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran secara berkala dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu tersebut harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis.

5. Memperbaiki penyajian laporan kinerja terutama mengenai ke dalam analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data, sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja ke depan;
6. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas dengan meningkatkan kapasitas evaluator Inspektorat sehingga mampu memberikan saran perbaikan yang konstruktif pada perangkat daerah.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.46**

Evaluasi pencapaian sasaranmeningkatnya kualitas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Pelayanan Publik	3,15	3,6	<b>114 %</b>

Realisasi indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 sebesar 3,6. Sasaran kinerja ini dapat dicapai sebesar 114% dibandingkan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 3,15. Realisasi kinerja berdasarkan pada rata-rata indeks pelayanan publik perangkat daerah yang menjadi sampel dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perangkat daerah yang menjadi sampel tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, dan Rumah Sakit Umum Daerah Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas.



Gambar 19. Penerimaan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2019 oleh 3 (tiga) perangkat daerah dari KemenPANRB di Jakarta

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut indeks pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan indeks pelayanan publik dari ke-3 perangkat daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan perubahan kategori

indeks menjadi kategori B-, yang semula dengan kategori C. Berikut perkembangan indeks penyelenggaraan pelayanan Publik Tahun 2018-2019.

**Tabel 3.47**  
Perkembangan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2018-2019

No	SKPD	Indeks Tahun 2018 (kategori)	Indeks Tahun 2019 (kategori)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,78 (C)	3,25 (B-)
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas	3,4 (B-)	3,98 (B)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas	3,06 (B-)	3,59 (B)
<b>Nilai rata-rata Pemda Kab. Kapuas</b>		<b>3,08 (B-)</b>	<b>3,6 (B)</b>

Pencapaian yang baik atas kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik tetap perlu dilakukan peningkatan. Peningkatan dimaksud dilakukan dengan upaya menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan atas hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019. Beberapa rekomendasi yang akan di tindak lanjuti diantaranya penguatan kebijakan pelayanan dengan membuat rencana tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan melaksanakan survei tersebut setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.

Selanjutnya pada indikator Sistem Informasi Pelayanan Publik diperlukan intensitas publikasi melalui website dan media sosial mengenai Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Kode Etik Pegawai serta hal lainnya terkait pelayanan publik. Selain itu terdapat beberapa rekomendasi bagi masing-masing perangkat daerah sampel evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik pada indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan Publik.

### 3. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pencapaian target kinerja atas sasaran Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur berdasarkan pencapaian indikator sebagai berikut.

**Tabel 3.48**

Evaluasi pencapaian sasaran meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Skor EPPD	2,8075	3,0356	<b>108%</b>

Pada tahun 2019, penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kapuas berhasil meningkatkan skor yang diperoleh dari Evaluasi terhadap LPPD Tahun 2018 dengan skor yang diperoleh yaitu 3,0356 yang pada tahun sebelumnya yaitu 2,6820. Skor tersebut sudah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 2,8075.

Berdasarkan hasil EKPPD Pemerintah Kabupaten Kapuas, ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi untuk perbaikan capaian LPPD Pemerintah Kabupaten Kapuas antara lain sebagai berikut :

1. Agar masing-masing wilayah dapat mewajibkan bagi masyarakat yang telah dan akan mendirikan bangunan untuk memiliki IMB dan melaporkannya ke Dinas Perizinan.
2. Agar menjalin kerjasama/ MoU dengan daerah lain.
3. Agar Perda atau Perbup tentang konsultasi publik segera ditetapkan.
4. Agar meningkatkan PAD seluruh potensi pendapatan dalam struktur APBD.
5. Agar PAD ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Agar mengupayakan untuk memperoleh penghargaan dari pemerintah lebih banyak.
7. Meningkatkan realisasi investasi melalui iklim investasi yang kondusif.
8. Agar masing-masing perangkat daerah menyusun SOP bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Agar jabatan fungsional diisi sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Agar penempatan PNS di Perangkat Daerah seimbang dengan kebutuhan kabupaten.
11. Agar diisi oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan.
12. Agar anggaran Perangkat Daerah menyesuaikan dengan APBD.
13. Agar rasio belanja modal terhadap belanja Perangkat Daerah disesuaikan.
14. Agar total belanja pemeliharaan dari total belanja barang jasa disesuaikan.
15. Agar total belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah disesuaikan.
16. Agar ditingkatkan jumlah fasilitas/ prasarana informasi.
17. Agar dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memaksimalkan pencapaian target sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi terkait penyusunan LPPD Kabupaten Kapuas dan perbaikan data pendukung LPPD Kabupaten Kapuas di Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Permintaan pendampingan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah terkait perbaikan data dalam penyusunan LPPD Kabupaten Kapuas.
3. Melaksanakan Sosialisasi dan Asistensi terkait penyusunan dan pengumpulan data LPPD Kabupaten Kapuas kepada seluruh Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Kapuas.
4. Secara Intensif melakukan koordinasi kepada seluruh Tim Penyusunan LPPD Kabupaten Kapuas terkait progres penyusunan maupun data yang dibutuhkan dalam penyusunan LPPD Kabupaten Kapuas.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing - masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

### Belanja Daerah

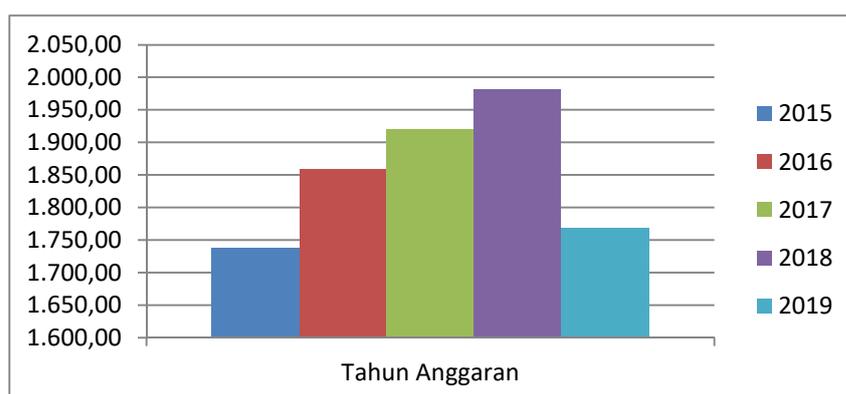
Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas (APBD) menganggarkan belanja sebesar Rp. 1.768.803.555.342,-. Anggaran belanja daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 ini lebih kecil dibandingkan tahun 2018 yakni sebesar Rp. 1.982.631.000.000,- dan tahun 2017 sebesar Rp. 1.921.085.590.189,01,-.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program - program strategis daerah. Jumlah belanja tersebut dialokasikan kembali untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer.

**Grafik 3.15**

Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2015-2019



Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Rp. 1.286.010.123.188,- digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada masing-masing satuan kerja. Sedangkan belanja modal sebesar Rp. 476.793.432.154,- dialokasikan diantaranya untuk belanja modal tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan.

**Tabel 3.47**  
Alokasi belanja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

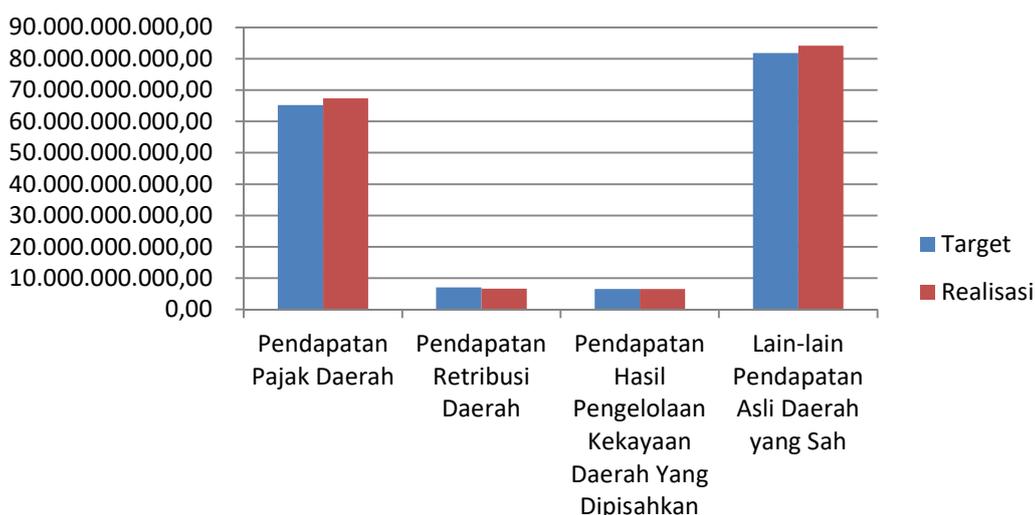
APBD		Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
<b>BELANJA</b>		1.768.803.555.342	1.611.689.276.752	91,12
<b>BELANJA OPERASI</b>		1.286.010.123.188	1.155.109.021.969,48	89,82
1	Belanja Pegawai	660.859.495.390	612.229.171.633	92,64
2	Belanja Barang dan Jasa	573.246.417.798	506.420.012.521,34	88,34
3	Belanja Bunga	3.200.000.000	3.090.767.815,14	96,59
4	Belanja Hibah	29.755.400.000	24.307.870.000	81,69
5	Belanja Bantuan Sosial	18.948.810.000	9.061.200.000	47,82
<b>BELANJA MODAL</b>		476.793.432.154	455.375.755.432,55	95,51
1	Belanja Modal Tanah	3.999.950.000	3.582.507.350	89,56
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.875.461.004	65.118.466.481,33	98,85
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	101.911.085.950	95.237.328.761,60	93,45
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.718.625.200	287.933.322.766,62	95,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.103.060.000	3.450.605.073	84,10
6	Belanja Modal Aset Lainnya	185.250.000	53.525.000	28,89
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>		6.000.000.000	1.204.499.350	20,07
1	Belanja Tak Terduga	6.000.000.000	1.204.499.350	20,07

## Pendapatan Daerah

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Tahun 2019 terrealisasi Rp. 164.668.578.831,38,- atau mencapai 102,49 % dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp. 160.666.414.000,-. PAD ini meliputi Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

**Grafik 3.16**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019



**Tabel 3.48**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

APBD		Anggaran	Realisasi	%
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		2.073.312.122.000	1.969.793.972.040,23	95,01
<b>PAD</b>		160.666.414.000	164.668.578.831,38	102,49
1	Pajak Daerah	65.238.000.000	67.306.044.919,65	103,17
2	Retribusi Daerah	7.074.767.000	6.650.247.481,79	94,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.542.621.000	6.545.945.982	100,05
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	81.811.026.000	84.166.340.447,94	102,88

Berdasarkan data diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar berasal dari sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni sebesar Rp. 84.166.340.447,94 atau sebesar 102,88% dari target yang ditetapkan. Sedangkan untuk retribusi daerah masih perlu dilakukan peningkatan kinerja dikarenakan masih belum mencapai target yang ditetapkan atau dengan realisasi sebesar 94,00%.

Pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah telah melebihi target dengan realisasi sebesar 103,17% dengan jumlah pendapatan Rp. 67.306.044.919,65. Sektor yang memberikan kontribusi besar pada pendapatan pajak daerah yakni berasal dari pajak restoran dan pajak hotel.

**Tabel 3.49**  
Pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah Kabupaten Kapuas dari tahun 2015-2019  
(Miliar Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pendapatan Daerah	1.447	1.660	1.668	1.693	1.969
2	Pendapatan Asli Daerah	89,10	84,94	93,47	107	164

Berdasarkan tabel diatas, capaian Pendapatan Daerah pada Tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dicapai dengan baik dan terus mengalami peningkatan yang signifikan.

### Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah dikelompokkan ke dalam penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berikut anggaran dan realiasi pembiayaan daerah.

**Tabel 3.50**  
Anggaran dan realiasi pembiayaan daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019

APBD		Anggaran (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		103.205.160.415,83	103.355.160.415,83	100,15
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	103.205.160.415,83	103.205.160.415,83	100,00
2	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	150.000.000	0
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>		13.600.000.000	12.516.129.032,26	92,03
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000	10.000.000.000	90,91
2	Pembayaran Pokok Utang	2.600.000.000	2.516.129.032,26	96,77

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 serta penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

#### A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 memuat dan menyajikan pencapaian atas target indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2019. Laporan ini memuat informasi kinerja, realisasi kinerja serta hambatan/kendala yang dihadapi.
2. Berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja terhadap 5 Tujuan dengan 9 Indikator tujuan diperoleh 2 indikator tujuan mencapai target dan 7 indikator tujuan dengan capaian diatas 90%. Sedangkan pada 24 Sasaran dengan 42 indikator sasaran diperoleh 24 indikator sasaran mencapai target serta terdapat 2 Indikator sasaran dengan capaian dibawah 50%.
3. Secara umum capaian kinerja dapat terealisasi dengan baik walaupun tidak memenuhi target capaian 100%. Capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat dan dunia usaha.

#### B. PERMASALAHAN DAN SARAN PERBAIKAN

Dalam penyusunan dan pemaparan realisasi dan capaian kinerja dalam laporan kinerja ini masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi di antaranya :

1. Permasalahan yang melanda organisasi pemerintah saat ini yaitu masih adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar. Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan organisasi seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan pada input tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan.
2. Penyusunan Laporan Kinerja yang dianggap sebagai formalitas sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas dalam pengumpulan data terkait dengan capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.
3. Perangkat Daerah masih belum “membangkitkan” Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada.
4. Perangkat Daerah masih kurang memahami pentingnya pengukuran dan pengumpulan serta pelaporan data capaian kinerja yang baik dan akurat sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kualitas atas narasi laporan capaian kinerja pemerintah daerah yang disampaikan.
5. Penyusunan *cascading* kinerja dari setiap tingkatan belum tersusun secara seksama dan selaras sehingga tujuan dan sasaran utama pemerintah daerah yang telah ditetapkan belum dapat dicapai dengan maksimal.

Atas beberapa kendala tersebut diperlukan perbaikan-perbaikan ke depan sehingga Laporan Kinerja ini dapat diandalkan sebagai referensi pengambilan kebijakan pembangunan daerah selanjutnya. Beberapa sasaran perbaikan diantaranya adalah :

1. Proses penyusunan Laporan Kinerja harus mengacu kepada pedoman Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Analisis capaian kinerja perlu dipertajam dengan memuat upaya-upaya yang telah dilakukan. Disamping itu, upaya tersebut merupakan langkah konkrit dari perangkat daerah terkait dalam pencapaian kinerja dalam 1 tahun bukan dari penanggungjawab data saja.
3. Masing-masing analisis harus menggambarkan sinergi dan kolaborasi dari setiap perangkat daerah dalam pencapaian indikator tujuan dan sasaran.
4. Memperkuat pengukuran kinerja secara berkala sehingga dapat dilihat perkembangan capaian kinerja pada periode tertentu.
5. Diperlukan adanya sistem aplikasi elektronik SAKIP yang dapat memudahkan dalam pengelolaan data kinerja, sehingga informasi kinerja dapat diperoleh dengan cepat dan akurat.

# PERJANJIAN KINERJA



## PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kapuas, 27 Maret 2019

**BUPATI KAPUAS,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT'.

**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

## PERJANJIAN KINERJA

**KABUPATEN : KAPUAS**  
**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	70,19
1.1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,80
		Harapan Lama Sekolah	12,94
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,47
2	Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Pembangunan	Angka Kemiskinan	5,02
2.1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Jumlah PMKS(diluar Korban Bencana)	19.916
2.2	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96,59
		Indeks Pemberdayaan Gender	71,5
2.3	Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang kompeten, produktif, dan berdaya saing	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	10,32
2.4	Meningkatnya peran pemuda, olahraga dan seni budaya dalam pembangunan	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi/nasional	6
		Jumlah cabang olahraga yang mendapat prestasi	5
		Jumlah kunjungan wisatawan	600
2.5	Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama	Jumlah Konflik	0
3	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.61
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,67
3.1	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	0,595
3.2	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	6.65
3.3	Meningkatnya kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian daerah	Kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	4,87

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
3.4	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Konsumsi	86
3.5	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	6.35
		Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan (termasuk reparasi kendaraan bermotor)	9.36
3.6	Meningkatnya penanaman modal usaha di Kabupaten Kapuas	Jumlah realisasi investasi (milyar rupiah)	7.574,11
4	Melestarikan Lingkungan Hidup dan kearifan lokal	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.65
4.1	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	50
		Indeks kualitas udara	90
4.2	Terwujudnya kelestarian budaya dayak	Jumlah konflik tenurial terkait dengan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah	0
5	Mewujudkan Infrastruktur Dasar Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Gini	0.2983
5.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	62.06
5.2	Meningkatnya pelayanan angkutan yang murah, mudah, aman lancar, dan terjangkau	Jumlah penumpang angkutan umum	18.000
5.3	Optimalnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Persentase rumah layak huni	35.00
		Rasio Elektrifikasi	75.00
		Persentase rumah tangga sumber air minum layak	45.00
		Persentase Rumah Tangga Berakses Air Limbah Layak (%)	57
		Presentase Luas Kawasan Yang Peruntukannya Sesuai Tata Ruang	100%
		Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	84,17

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
6	Implementasi Reformasi Birokrasi di seluruh aspek pembangunan	Indeks Reformasi Birokrasi	45
6.1	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	3.15
6.2	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti)*	75
6.3	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai evaluasi SAKIP	63.00 B
		Skor penyelenggaraan pemerintahan daerah	2,8875
6.4	Meningkatnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,31

No.	Program	Anggaran
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.005.500.000,00
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	112.337.670.000,00
3	Program Pendidikan Non Formal	1.332.400.000,00
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	52.942.875.000,00
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.300.500.000,00
6	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	277.750.000,00
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	24.250.000,00
8	Program Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi	78.000.000,00
9	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.710.831.000,00
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	36.628.570.900,00
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.910.767.500,00
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	905.397.500,00
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.210.133.000,00
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	4.722.629.500,00
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	752.222.000,00

No.	Program	Anggaran
16	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	5.480.780.000,00
17	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	13.664.386.000,00
18	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	5.745.958.000,00
19	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	43.960.218.500,00
20	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	536.022.000,00
21	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	21.120.000,00
22	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.328.602.000,00
23	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	48.000.000.000,00
24	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	209.126.577.000,00
25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11.068.574.000,00
26	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	507.000.000,00
27	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	2.200.000.000,00
28	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	50.000.000,00
29	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	38.974.320.000,00
30	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	26.061.743.000,00
31	Program Pengendalian Banjir	350.000.000,00
32	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.515.282.000,00
33	Program Perencanaan Tata Ruang	1.053.072.000,00
34	Program Pemanfaatan Ruang	129.372.000,00
35	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	28.056.000,00
36	Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi	200.000.000,00
37	Peningkatan Kualitas Kawasan kumuh Perkotaan	3.159.000.000,00
38	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, Keagamaan, Publik dan Keciptakarya	31.203.985.000,00
39	Penataan Kawasan dan Lingkungan Pemukiman	18.750.000.000,00
40	Penyusunan/Pemuktahiran Data dan Informasi serta Perencanaan/Pengendalian Infrastruktur Bidang Cipta Karya	925.733.000,00
41	Program Pengembangan Perumahan	1.602.317.000,00
42	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	11.287.334.000,00

No.	Program	Anggaran
43	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	287.000.000,00
44	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	319.225.000,00
45	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	96.108.000,00
46	Program pendidikan politik masyarakat	300.000.000,00
47	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional di Daerah	84.500.000,00
48	Program Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan	203.892.000,00
49	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	338.000.000,00
50	Program pengembangan wawasan kebangsaan	893.794.000,00
51	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	216.628.000,00
52	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.400.248.000,00
53	Program pembinaan anak terlantar	66.050.000,00
54	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	510.284.000,00
55	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	46.111.000,00
56	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	535.302.000,00
57	Program pengelolaan taman makam pahlawan	28.433.000,00
58	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.382.475.000,00
59	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	195.715.000,00
60	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	417.800.000,00
61	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	188.115.000,00
62	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	157.500.000,00
63	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	298.120.000,00
64	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	35.000.000,00
65	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	30.000.000,00
66	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	340.000.000,00
67	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	60.000.000,00
68	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana	441.550.000,00
69	Program Penanggulangan Bencana	295.150.000,00

No.	Program	Anggaran
70	Program Pasca Bencana	40.000.000,00
71	Program Logistik dan Peralatan	160.000.000,00
72	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	313.610.000,00
73	Program peningkatan kesiapsiagaan bencana	17.500.000,00
74	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	25.311.425.000,00
75	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	166.500.000,00
76	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	20.000.000,00
77	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50.000.000,00
78	Program pengendalian kebakaran hutan	10.000.000,00
79	Program penanaman pohon pada lahan diluar kawasan (DBH-DR)	2.256.100.000,00
80	Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan (DBH-DR)	297.500.000,00
81	Program penanaman bambu pd kanan kiri sungai, sempadan danau dan DTA, sktr mata air dan daerah imbuhan air tanah (DBH DR)	350.000.000,00
82	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.215.741.000,00
83	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3.724.483.000,00
84	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	69.000.000,00
85	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	219.355.000,00
86	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	169.700.000,00
87	Penataan dan Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa	1.109.830.000,00
88	Program Keluarga Berencana	4.896.912.000,00
89	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	30.000.000,00
90	Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas	40.600.000,00
91	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	537.243.000,00
92	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	874.700.000,00
93	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.273.220.000,00
94	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	1.430.000.000,00

No.	Program	Anggaran
95	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah	20.000.000,00
96	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.312.636.000,00
97	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	75.000.000,00
98	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.800.000.000,00
99	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	256.640.000,00
100	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	35.806.000,00
101	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	155.000.000,00
102	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	50.000.000,00
103	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	50.000.000,00
104	Program peningkatan peran serta kepemudaan	656.000.000,00
105	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	70.000.000,00
106	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	540.000.000,00
107	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	530.000.000,00
108	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	160.000.000,00
109	Program Pengembangan Nilai Budaya	300.000.000,00
110	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	220.000.000,00
111	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.530.000.000,00
112	Program Koleksi Perpustakaan Daerah	60.000.000,00
113	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	5.280.000,00
114	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26.560.000,00
115	Program pengembangan budidaya perikanan	2.238.288.000,00
116	Program pengembangan perikanan tangkap	1.471.987.000,00
117	Program pengelolaan usaha perikanan	299.969.000,00
118	Program pengembangan pemasaran pariwisata	155.000.000,00
119	Program pengembangan destinasi pariwisata	40.000.000,00
120	Program pengembangan Kemitraan	290.000.000,00
121	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	2.300.000.000,00
122	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	247.689.000,00
123	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	3.326.540.000,00
124	Program peningkatan produksi peternakan	4.218.024.000,00

No.	Program	Anggaran
125	Program agribisnis pertanian dan keamanan pangan	933.623.000,00
126	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	2.461.482.000,00
127	Program Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pertanian	7.075.477.000,00
128	Program Peningkatan Produksi Hortikultura	863.165.000,00
129	Peningkatan Produksi Perkebunan	605.525.000,00
130	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.366.000.000,00
131	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	8.251.312.000,00
132	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	100.000.000,00
133	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	250.000.000,00
134	Program pengembangan industri kecil dan menengah	235.806.000,00
135	Program pengembangan wilayah transmigrasi	3.182.000.000,00
136	Program Transmigrasi lokal	40.000.000,00
137	Program perencanaan kawasan transmigrasi	220.000.000,00
138	Program peningkatan dan pembangunan sarana prasarana dan utilitas dikawasan transmigrasi	40.000.000,00
139	Program pengembangan administrasi pelayanan perijinan	140.000.000,00
140	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	4.229.396.000,00
141	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	60.000.000,00
142	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.132.000.000,00
143	Program pembinaan dan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan	552.580.000,00
144	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1.181.000.000,00
145	Program Administrasi dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi Daerah	462.000.000,00
146	Program Penanganan Konflik Sumber Daya Alam bidang Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Peternakan	77.000.000,00
147	Program Administrasi Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah	716.000.000,00
148	Administrasi Pelaksanaan Kegiatan, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	465.000.000,00
149	Administrasi Pembinaan Dan Kelembagaan Keagamaan	1.865.939.000,00
150	Administrasi Pembinaan Kemasyarakatan Dan Kesejahteraan Rakyat	169.061.000,00
151	Program Otonomi Daerah	580.000.000,00
152	Program Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani	102.800.000,00

No.	Program	Anggaran
153	Program Penguatan Kelembagaan KORPRI	102.400.000,00
154	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.390.974.000,00
155	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	359.772.000,00
156	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	27.429.000,00
157	Program pengembangan data/informasi	465.390.000,00
158	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	628.879.000,00
159	Program perencanaan pembangunan daerah	1.532.031.000,00
160	Program perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan	686.000.000,00
161	Program perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	290.000.000,00
162	Program penelitian dan pengembangan	597.000.000,00
163	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	1.030.748.000,00
164	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	416.500.000,00
165	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	296.500.000,00
166	Program Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah	1.414.000.000,00
167	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.669.463.600,00
168	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.159.851.000,00

Kuala Kapuas, 27 Maret 2019

**BUPATI KAPUAS,**

**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN



## PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

Jabatan : **BUPATI KAPUAS**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Kuala Kapuas, 16 Agustus 2019

**BUPATI KAPUAS,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ben Brahim S. Bahat', written over a faint blue line.

**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

## PERJANJIAN KINERJA

**KABUPATEN : KAPUAS**  
**PROVINSI : KALIMANTAN TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,19
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,8
			Harapan Lama Sekolah	12,94
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,47
		Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	38
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96,59
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	2,30
			Angka Kemiskinan	4,96
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita / Tahun	10.143.965
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	5,46
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,61
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,40
2.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,82
		Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20,69
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	12,00
			Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,87

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,03
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	80,2
			Skor PPH Konsumsi	85,5
		Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	5,72
		Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	6,15
			Indeks Gini	0,2983
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	3,06
			Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	58
		Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	0,601
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,12
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	48,80
			Indeks Kualitas Udara	89,26
			Tutupan Lahan	63,22
		Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota	Skor penilaian adipura	75,70
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	8,32
			Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	33,06
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya	jumlah warisan budaya ditetapkan propinsi kalimantan tengah	0
			Jumlah Kunjungan Wisata	7000

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
			Angka Kriminalitas	3,70
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka konflik	16
			Penurunan pelanggaran Perda	126
4	Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur		Angka Konektivitas	66,84
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Panjang jalan dalam kondisi mantap	60,14 (1.289,45 Km)
			Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	40
			Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	83
		Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	45,89
			Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	55,66
			Persentase rumah layak huni	87,12
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	76,34
			Rasio Elektrifikasi	75
		5.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			45
	Nilai SAKIP			67,00 (B)
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK			WTP
	Nilai SAKIP			67,00 (B)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik			3,15

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor EPPD	2,8075

Kuala Kapuas, 16 Agustus 2019

**BUPATI KAPUAS,**



**Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T.**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2018 - 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB												
1	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ <p>Dimana:            X(1) : Indeks harapan hidup            X(2) : Indeks pendidikan = <math>2/3(\text{indeks melek huruf}) + 1/3(\text{indeks rata rata lama sekolah})</math>            X(3) : Indeks standar hidup layak</p> $\text{Indeks } X(i) = \frac{X(i) - X(i)_{\min}}{X(i)_{\max} - X(i)_{\min}}$ <p>Dimana:            X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)            X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i)            X(3) : Nilai minimum sekolah X(i)</p> <p>Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator Komponen IPM (=X(1))</th> <th>Nilai maksimum</th> <th>Nilai Minimum</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Angka Harapan Hidup</td> <td>85</td> <td>25</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> <tr> <td>Angka Melek Huruf</td> <td>100</td> <td>0</td> <td>Sesuai standar global (UNDP)</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator Komponen IPM (=X(1))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan	Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)	Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Komponen IPM (=X(1))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan													
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)													
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)													

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI				PENANGGUNGJAWAB
			Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)	
			Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 a)	300.000 b)	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan	
			<b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas				
		Angka Kemiskinan	<b>Definisi Operasional :</b> Persentase penduduk dengan kategori pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.  <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas				Dinas Sosial
		Tingkat Pengangguran Terbuka	<b>Definisi Operasional :</b>  $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas				Dinas Tenaga Kerja
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	<b>Definisi Operasional :</b> Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi.  $\frac{PDRB_{(tahun+1)} - PDRB_{(tahun)}}{PDRB_{(tahun)}} \times 100\%$ <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
		Indeks Gini	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_i - 1)$ <p>dimana:</p> <p>P<sub>i</sub> : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i</p> <p>Q<sub>i</sub> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>♦G &lt; 0,3 = ketimpangan rendah</li> <li>♦0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang</li> <li>♦G &gt; 0,5 = ketimpangan tinggi</li> </ul> <p><b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas</p>	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil perhitungan Dinas Lingkungan Hidup</p>	Dinas Lingkungan Hidup
		Angka Kriminalitas	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Data awal jumlah tindak kriminal} - \text{Data Akhir jumlah tindak kriminal}}{\text{Data awal jumlah tindak kriminal}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil laporan dari Polresta Kab.Kapuas</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur	Angka Konektivitas	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kecamatan yang terkoneksi dengan jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
			<b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
5	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>Forumulasi :</b> Nilai Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Pemerintah Kab. Kapuas  <b>Sumber data :</b> LHE Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		Nilai SAKIP	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran  <b>Sumber data :</b> LHE SAKIP dari Kementerian PANRB	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	<b>Definisi Operasional :</b> Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani  <b>Sumber data :</b> Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Harapan Lama Sekolah	<b>Definisi Operasional :</b> Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang  <b>Sumber data :</b> Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<b>Definisi Operasional :</b> Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas	Dinas Kesehatan

			menurut umur  <b>Sumber data</b> : BPS Kab. Kapuas	
3	Menurunnya prevalensi <i>Stunting</i>	Persentase Angka <i>Stunting</i> (%)	<b>Definisi Operasional</b> : Jumlah balita sangat pendek dan pendek pada suatu periode dibagi jumlah seluruh balita pada periode yang sama x 100%  <b>Sumber data</b> : Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	<b>Definisi Operasional</b> : Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Nilai IPG berkisar 0-100 persen, semakin tinggi nilai IPG maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan  <b>Sumber data</b> : BPS Kab. Kapuas	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	<b>Definisi Operasional</b> : Persentase pemuda berprestasi =  $\frac{\text{Jumlah prestasi pemuda yang diperoleh}}{\text{Jumlah peserta yang dikirim}} \times 100\%$  Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi = Persentase pemuda berprestasi tahun berjalan – Persentase pemuda berprestasi tahun sebelumnya.  <b>Sumber data</b> : Laporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita / Tahun	<b>Definisi Operasional</b> : Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan

			rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.  <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas	Usaha Kecil Menengah
7	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	<b>Definisi Operasional :</b>  $\frac{\text{Jumlah PMKS yang mampu hidup mandiri}}{\text{Jumlah seluruh PMKS yang dibina}} \times 100\%$  <b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Sosial Kab. Kapuas	Dinas Sosial
8	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	<b>Definisi Operasional :</b>  $\frac{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 Tahun)}} \times 100\%$  <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas	Dinas Tenaga Kerja
9	Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> Nilai PDRB sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) dibagi PDRB total kabupaten  $\frac{\text{Jumlah nilai PDRB tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan}}{\text{Jumlah nilai investasi awal}} \times 100\%$  <b>Sumber data :</b> BPS Kab. Kapuas	Dinas Pertanian
		Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b>  $\frac{\text{Nilai industri pengolahan}}{\text{Nilai total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

			<b>Sumber data</b> : Sensus ekonomi dan berbagai survei BPS	
		Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Produksi perikanan tahun } n \times \text{harga pada tahun dasar (2010)}}{\text{PDRB total Kabupaten Kapuas}} \times 100\%$ <b>Sumber data</b> : BPS Kab. Kapuas	Dinas Perikanan
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Nilai perdagangan}}{\text{Nilai total PDRB}} \times 100\%$ <b>Sumber data</b> : Sensus ekonomi dan berbagai survei BPS	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
10	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	<b>Definisi Operasional :</b> Data ketersediaan pangan berdasarkan sistem informasi (aplikasi) PPH Ketersediaan Pangan. <b>Sumber data</b> : Data Susenas (BPS)	Dinas Ketahanan Pangan
		Skor PPH Konsumsi	<b>Definisi Operasional :</b> Data Konsumsi pangan berdasarkan sistem informasi (aplikasi) PPH Konsumsi Pangan. <b>Sumber data</b> : Data Susenas (BPS)	Dinas Ketahanan Pangan
11	Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	<b>Definisi Operasional :</b> $\frac{\text{Nilai investasi awal} - \text{Nilai akhir}}{\text{Nilai investasi awal}} \times 100\%$ <b>Sumber data</b> : Laporan nilai investasi bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah realisasi PAD}}{\text{Jumlah realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah</p>	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
13	Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan penilaian kesehatan koperasi berkualitas oleh Bidang Koperasi dan UKM</p>	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah UMKM Akhir} - \text{Jumlah UMKM Awal}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan hasil pendataan pertumbuhan usaha UKM langsung dilapangan oleh Bidang Koperasi dan UKM</p>	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Meningkatnya ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	<p><b>Definisi Operasional :</b> 1/3 (IKE + IKL+IKS) Indeks ketahan Ekonomi Indeks Ketahanan Lingkungan Indeks Ketahanan Sosial</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Hasil Indeks Desa Membangun (IDM)</p>	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKA - INA = \sum_{i=1}^n w_i I_i$	Dinas Lingkungan Hidup

			<p>Keterangan :</p> <p>w : bobot</p> <p>I : sub-indeks</p> <p>Perhitungan IKA-INA sesuai template SISKANA</p> <p><b>Sumber data :</b> Hasil pemantauan kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup</p>	
		Indeks kualitas udara	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} x (I_{eu} - 0,1)\right)$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil pemantauan kualitas udara Dinas Lingkungan Hidup dan Dirjen Pengendalian Pencemaran Udara (PPU), KLHK-RI</p>	Dinas Lingkungan Hidup
		Tutupan Lahan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$ <p>Keterangan :</p> <p>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>ITH = Indeks Tutupan Hutan</p> <p>IPH = Indeks Performance Hutan</p> <p>IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah</p> <p>IKBA = Indeks Konservasi Badan Air</p> <p>IKH = Indeks Kondisi Habitat</p> <p><b>Sumber data :</b> Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, KLHK - RI</p>	Dinas Lingkungan Hidup
16	Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota	Skor penilaian adipura	<b>Definisi operasional:</b>	Dinas Lingkungan Hidup

			<p>Nilai Titik Pantau Program Penghargaan Adipura</p> <p><b>Sumber data :</b> Hasil penilaian adipura oleh tim penilai adipura</p>	
17	Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Luas kawasan peruntukan permukiman}}{\text{Luasan kawasan yang sesuai rencana tata ruang}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Tata Ruang DPUPRPKP Kab. Kapuas</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia}}{\text{Luasan RTH yang seharusnya}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Pertamanan &amp; Kebersihan DPUPRPKP Kab. Kapuas</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
18	Meningkatnya pelestarian warisan budaya	Jumlah warisan budaya ditetapkan Provinsi Kalimantan Tengah	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah warisan budaya yang ditetapkan Provinsi Kalimantan Tengah dalam 1 (satu) Tahun</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah Kunjungan Wisata	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah kunjungan pada destinasi wisata Kabupaten Kapuas dalam satu tahun</p> <p><b>Sumber data :</b> Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga</p>	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

19	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka konflik	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Data awal jumlah konflik} - \text{Data Akhir jumlah konflik}}{\text{Data awal jumlah konflik}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Hasil laporan dari Polresta Kab. Kapuas dan Bagian Tapem Setda</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Penurunan pelanggaran Perda	<p><b>Definisi Operasional :</b> Jumlah Kasus pelanggaran perda yang selesai ditindaklanjuti</p> <p><b>Sumber data :</b> Laporan Penegakan Perda</p>	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
20	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Panjang jalan dalam kondisi mantap	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik} + \text{kondisi sedang}}{\text{Total Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Bina Marga DPUPRPKP Kab. Kapuas</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi}}{\text{Total jumlah desa}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Kapuas</p>	Dinas Komunikasi dan Informatika

		Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi darat ke ibukota}}{\text{Total jumlah desa dan kelurahan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Laporan Dinas Perhubungan</p>	Dinas Perhubungan
21	Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga Kab. Kapuas}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database cipta karya - BPS</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air limbah}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga Kab. Kapuas}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database Cipta Karya - BPS</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase rumah layak huni	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Total jumlah rumah} - (\text{RTLH} - \text{Penanganan})}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Bidang Perumahan</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

		Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah kawasan kumuh yang tertangani}}{\text{Luas kawasan kumuh perkotaan}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Database Cipta Karya - BPS</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio Elektrifikasi	<p><b>Definisi Operasional :</b></p> $\frac{\text{Jumlah rumah tangga teraliri listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$ <p><b>Sumber data :</b> Data PLN, Data Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Kalteng dan Pemantauan Lapangan</p>	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
22	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><b>Forumulasi :</b> Nilai Evaluasi atas kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi Pemerintah Kab. Kapuas</p> <p><b>Sumber data :</b> LHE Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
23	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK	<p><b>Definisi Operasional :</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas</p> <p><b>Sumber data :</b> LHP BPK RI atas Laporan keuangan</p>	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  Inspektorat Daerah
		Nilai SAKIP	<p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran</p> <p><b>Sumber data :</b> LHE SAKIP dari Kementerian PANRB</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
24	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	<p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik</p> <p><b>Sumber data :</b> LHE atas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

			Kementerian PANRB	
25	Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor EPPD	<p><b>Definisi Operasional :</b> Nilai evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p><b>Sumber data :</b> Peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Kementerian Dalam Negeri</p>	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

## REKAPITULASI REALISASI KINERJA TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2019

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kehidupan Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia	70,19	69,38	98,84
		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	7,8	7,51	96,00
			Harapan Lama Sekolah	12,94	12,70	98,00
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,47	68,69	98,87
		Menurunnya prevalensi Stunting	Persentase Angka Stunting	38	27,6	72,63
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	96,59	96,26	99,00
		Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan	Persentase peningkatan jumlah pemuda berprestasi	2,30	22,70	>100
			Angka Kemiskinan	4,96	5,20	95,12
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Angka Pengeluaran Perkapita / Tahun	10.143.965	14.691.684	>100
		Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat PMKS	Persentase PMKS yang mampu hidup mandiri	5,46	51,15	>100
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,61	4,08	88,50
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,40	69,55	103,18		
2.	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah secara berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,82	7,16	92,00
		Meningkatnya kontribusi sektor Unggulan daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	20,69 %	20,23 %	97,77
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	12,00 %	11,53 %	96,08
			Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB	4,87 %	6,38 %	>100

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
			Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	16,03 %	16,27 %	101,00
		Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	80,2	82,5	102,00
			Skor PPH Konsumsi	85,5	77,8	90,99
		Meningkatnya penanaman modal di Kabupaten Kapuas	Persentase peningkatan realisasi investasi	5,72	953	>100
		Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Persentase PAD Terhadap pendapatan daerah	6,15	8,56	>100
			Indeks Gini	0,2983	0,328	90,00
		Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM	Persentase peningkatan koperasi yang sehat	3,06	15,8	>100
			Pertumbuhan Volume usaha UKM (%)	58	42,2	72,75
		Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan sosial desa	Indeks desa membangun	0,601	0,573	95,34
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pelestarian budaya dan ketentraman masyarakat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,12	72,32	98,90
		Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	48,80	47,50	97,33
			Indeks Kualitas Udara	89,26	95,96	107,00
			Tutupan Lahan	63,22	73,20	115,00
		Meningkatnya kebersihan dan keteduhan kota	Skor penilaian adipura	75,70	73,56	97
		Meningkatnya kualitas penataan ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	8,32	0,094	2,00
			Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap luas kawasan terbangun	33,06	5,086	16,00
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya	jumlah warisan budaya ditetapkan propinsi kalimantan tengah	NA	NA	-

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
			Jumlah Kunjungan Wisata	7.000	66.666	>100
			Angka Kriminalitas	3,70	5,68	>100
		Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Angka konflik	16	5	>100
			Penurunan pelanggaran Perda	126	121	96,03
4	Meningkatnya konektivitas terhadap infrastruktur		Angka Konektivitas	66,84	65,91	98,60
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Panjang jalan dalam kondisi mantap	60,14 (1.289,45 Km)	59,39 % (1.273,46 KM)	98,75
			Persentase desa dan kelurahan yang terhubung dengan moda transportasi daratan	40	46,75	116,00
			Persentase desa yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi	83	81,7	98,43
		Meningkatnya kualitas permukiman	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM	45,89	55,14	120,00
			Persentase jumlah rumah tangga berakses pengolahan air limbah domestik	55,66	56,17	100,00
			Persentase rumah layak huni	87,12	87,6	100,00
			Persentase penurunan luas kawasan kumuh perkotaan	76,34	72,36	94,78
			Rasio Elektrifikasi	75	79,59	106,12
		5.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat		Indeks Reformasi Birokrasi	45
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			45	65,39	>100
	Nilai SAKIP			67,00 (B)	64,75 (B)	96,64
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemda	Opini BPK			WTP	WTP*	100,00
	Nilai SAKIP			67,00 (B)	64,75 (B)	96,64

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
		Meningkatnya kualitas yanlik	Indeks Pelayanan Publik	3,15	3,6	114,00
		Meningkatnya kualitas urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Skor EPPD	2,8075	3,0356	108,00